



SALINAN

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2020**

TENTANG

KLASIFIKASI ARSIP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan memperlancar Penyelenggaraan Kearsipan dalam penataan arsip di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Barat ;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1035,2016);
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Perlindungan, Pengamanan dan Penyelamatan Dokumen/Arsip Vital Negara;
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Umum Pengelolaan Arsip Elektronik;
10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Surat Elektronik di Pencipta Arsip;
11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyerahan Arsip Statis bagi Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan, dan Perseorangan;
12. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas;
13. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Arsip;
16. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Program Arsip Vital;
17. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusutan Arsip;
18. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip;
19. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis;
20. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 18 Tahun 2010, tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 18);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembar Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
23. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 59).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KLASIFIKASI ARSIP.

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
5. Perangkat Daerah adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
6. Arsip Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat ANRI adalah lembaga kearsipan berbentuk lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan yang berkedudukan di ibukota negara.
7. Lembaga Kearsipan adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan.
8. Arsip daerah kabupaten/kota adalah lembaga kearsipan berbentuk satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota
9. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan
10. Naskah Dinas Penting adalah naskah dinas yang isinya mengikat, memerlukan tindak lanjut, memuat informasi penting, mengandung konsepsi kebijaksanaan mempunyai nilai arsip.
11. Naskah Dinas Biasa adalah naskah dinas yang isinya tidak mengikat.
12. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
13. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
14. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis masa retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan /atau lembaga kearsipan.

BAB II KLASIFIKASI ARSIP

Pasal 2

Klasifikasi Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan acuan bagi unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka pengelolaan arsip dinamis.

Pasal 3

- (1) Klasifikasi Arsip di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Barat menggunakan kode arsip dalam bentuk gabungan huruf dan angka
- (2) Kode klasifikasi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanda pengenal urusan sesuai fungsi dan tugas unit kerja serta berfungsi sebagai dasar pemberkasan dan penataan arsip.
- (3) Ketentuan mengenai kode klasifikasi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 20 Maret 2020

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 20 Maret 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

TTD

SUYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2020 NOMOR 12

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**WAHJU WIDIASTUTI, S.H., L.L.M
NIP. 19690112 199903 2 005**

LAMPIRAN I :
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG KLASIFIKASI ARSIP

A. Umum

1. Klasifikasi Arsip disusun berdasarkan masalah, mencerminkan fungsi dan kegiatan pelaksanaan tugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Klasifikasi diperinci secara desimal, dengan mempergunakan tiga angka dasar.
3. Klasifikasi disusun secara berjenjang dengan mempergunakan prinsip perkembangan dari umum kepada khusus dalam hubungan masalah, dengan penulisan Klasifikasi sebagai berikut:

1 4 5

1	100 : Pokok Masalah ttg PEMERINTAHAN
4	140 : Sub Masalah ttg PEMERINTAH DESA /KELURAHAN
5	145 : Sub Masalah ttg ADMINISTRASI DESA /KELURAHAN

4. Rincian klasifikasi yang menampung masalah-masalah fasilitas dan substansi Organisasi/Instansi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, adalah:

000 UMUM

010 URUSAN DALAM
020 BARANG DAN JASA
030 KEKAYAAN DAERAH
040 PERPUSTAKAAN / DOKUMEN / KEARSIPAN / SANDI
050 PERENCANAAN DAN EVALUASI
060 ORGANISASI / KETATALAKSANAAN
070 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
080 KONPERENSI / RAPAT KOORDINASI
090 PERJALANAN DINAS

100 PEMERINTAHAN

110 PEMERINTAHAN PUSAT
120 PEMERINTAHAN PROVINSI
130 PEMERINTAHAN KABUPATEN / KOTA
140 PEMERINTAHAN DESA / KELURAHAN
150 LEGISLATIF MPR / DPR / DPD
160 DPRD PROVINSI
170 DPRD KABUPATEN / KOTA
180 HUKUM
190 HUBUNGAN LUAR NEGERI

200 POLITIK

210 KEPARTAIAN
220 ORGANISASI KEMASYARAKATAN
230 ORGANISASI PROFESI DAN FUNGSIONAL

- 240 ORGANISASI PEMUDA
- 250 ORGANISASI BURUH, TANI DAN NELAYAN
- 260 ORGANISASI WANITA
- 270 PEMILU, PILKADA
- 280 PENGAWASAN PEMILU / PILKADA
- 300 KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM
 - 310 PERTAHANAN
 - 320 KEMILITERAN / TNI
 - 330 KEAMANAN
 - 340 PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 - 350 KEJAHATAN
 - 360 BENCANA
 - 370 KECELAKAAN
 - 380 PENDAMPINGAN, REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
 - 390 KERJASAMA BPBD DENGAN INSTANSI LAIN
- 400 KESEJAHTERAAN RAKYAT
 - 410 PEMBANGUNAN DESA / KELURAHAN
 - 420 PENDIDIKAN
 - 426 Keolahragaan
 - 427 Kepemudaan
 - 430 KEBUDAYAAN
 - 440 KESEHATAN
 - 445 RSU, RSJ, RS Khusus
 - 450 AGAMA
 - 460 SOSIAL
 - 470 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
 - 475 Transmigrasi
 - 476 Keluarga Berencana
 - 480 MEDIA MASSA
- 500 PEREKONOMIAN
 - 510 PERDAGANGAN
 - 518 Koperasi
 - 520 PERTANIAN
 - 522 Kehutanan
 - 523 Perikanan Dan Kelautan
 - 524 Peternakan Dan Kesehatan Hewan
 - 525 Perkebunan
 - 526 Ketahanan Pangan
 - 527 Penyuluhan
 - 530 PERINDUSTRIAN
 - 540 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 - 550 PERHUBUNGAN
 - 554 Pos
 - 555 Teknologi Informasi
 - 556 Pariwisata Dan Rekreasi
 - 557 Meteorologi
 - 560 TENAGA KERJA
 - 570 PENANAMAN MODAL
 - 580 PERBANKAN MONETER
 - 590 AGRARIA
- 600 PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN
 - 610 PENGAIRAN
 - 620 JALAN

- 630 JEMBATAN
- 640 BANGUNAN
- 650 TATA RUANG KOTA
- 660 TATA LINGKUNGAN
- 670 KETENAGAAN
- 680 PERALATAN PEKERJAAN UMUM
- 690 AIR MINUM
- 700 PENGAWASAN
 - 710 BIDANG PEMERINTAHAN
 - 720 BIDANG POLITIK
 - 730 BIDANG KEAMANAN / KETERTIBAN
 - 740 BIDANG KESEJAHTRAAN RAKYAT
 - 750 BIDANG PEREKONOMIAN
 - 760 BIDANG PEKERJAAN UMUM
 - 770 PENGAWASAN PEJABAT PUBLIK
 - 780 BIDANG KEPEGAWAIAN
 - 790 BIDANG KEUANGAN
- 800 KEPEGAWAIAN
 - 810 PENGADAAN
 - 820 MUTASI
 - 830 KEDUDUKAN
 - 840 KESEJAHTERAAN PEGAWAI
 - 850 CUTI
 - 860 PENILAIAN
 - 870 TATA USAHA KEPEGAWAIAN
 - 880 PEMBERHENTIAN
 - 890 KEPENDIDIKAN PEGAWAI
- 900 KEUANGAN
 - 910 ANGGARAN
 - 920 AKUNTANSI
 - 930 PERBENDAHARAAN
 - 940 PEMBINAAN KEBENDAHARAAN
 - 950 PENGELOLAAN KAS DAERAH
 - 960 EVALUASI DAN PENGENDALIAN
 - 970 PENDAPATAN

B. Rincian

KODE	KLASIFIKASI
000	UMUM
001	Lambang
001.1	Garuda
001.2	Bendera Kebangsaan
001.3	Daerah (Provinsi / Kabupaten / Kota)
001.4	Bandir / Umbul-Umbul
002	Tanda Kehormatan / Penghargaan (Khusus untuk Non PNS)
002.1	Bintang
002.2	Satyalencana
002.3	Satyakarya Nugraha
002.4	Penghargaan secara adat
002.5	Penghargaan lainnya (Kalpataru, Upakarti, Adipura, dsb)

003	<i>Hari Raya / Besar</i>
003.1	<i>Nasional (17 Agustus, Hari Pahlawan , Hari Anak, HKSN, dsb)</i>
003.2	<i>Keagamaan</i>
003.3	<i>Hari Ulang Tahun / HUT (Hari Jadi Provinsi/ Kabupaten/ Kota)</i>
	<i>Ucapan</i>
004.1	<i>Terima Kasih</i>
004.2	<i>Selamat</i>
004.3	<i>Mohon Diri</i>
004.4	<i>Bela Sungkawa</i>
004.5	<i>Ucapan Lainnya</i>
005	<i>Undangan</i>
006	<i>Tanda Jabatan</i>
006.1	<i>Pamong Praja</i>
006.2	<i>Jabatan Lainnya</i>
010	<i>URUSAN DALAM</i>
011	<i>Gedung Kantor, termasuk instalasi</i>
011.1	<i>Listrik</i>
011.2	<i>Telepon</i>
011.3	<i>Otomasi</i>
011.4	<i>Air Minum</i>
011.5	<i>Hidrant</i>
011.6	<i>Alarm</i>
011.7	<i>Internet</i>
012	<i>Rumah Dinas</i>
013	<i>Akomodasi / Persinggahan (Mess / Wisma / hotel)</i>
014	<i>Rumah Susun Apartemen</i>
015	<i>Peminjaman sarana Prasarana Kantor (ruangan, gedung, kendaraan, LCD, Laptop dll)</i>
016	<i>Pengurusan Kendaraan Dinas</i>
017	<i>Keamanan / Ketertiban Kantor</i>
018	<i>Kebersihan Kantor</i>
019	<i>Protokol</i>
019.1	<i>Upacara Bendera</i>
019.2	<i>Tata tempat</i>
019.21	<i>Pemasangan gambar Presiden / Wakil Presiden</i>
019.3	<i>Audiensi</i>
019.4	<i>Penerimaan Tamu</i>
019.5	<i>Kerjasama</i>
020	<i>BARANG DAN JASA</i>
021	<i>Penawaran</i>
021.1	<i>Penawaran Barang</i>
021.2	<i>Penawaran Jasa</i>
022	<i>Barang</i>
022.1	<i>Barang Bergerak</i>
022.2	<i>Barang Tidak Bergerak</i>
023	<i>Jasa</i>

024	Alat Tulis
025	Pakaian Dinas
026	-
027	Pengadaan termasuk pengumuman pengadaan, penunjuk lelang.
027.1	Prakualifikasi : rapat persiapan, HPS, penjelasan pekerjaan / anwijzing, negoisasi, evaluasi
027.2	SPK, Kontrak / Amandemen / Addendum, Teguran
027.3	Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
127.4	Serah Terima Pekerjaan
127.5	Pemeriksaan Pekerjaan
127.6	Perpanjangan Waktu / Ferce majore
127.7	Denda
127.8	Sanggahan
127.9	Pemeliharaan Barang / Jasa
028	Inventaris
028.1	Pendapatan Barang Milik Negara
028.2	Pemeliharaan Barang Milik Negara
028.3	Penghapusan Barang Milik Negara
030	KEKAYAAN DAERAH
031	Barang-Barang tidak bergerak (tanah, perkebunan, pertanian, hutan, tambak)
032	Barang-Barang tidak bergerak (gedung, asrama, monumen / bangunan bersejarah dll)
033	Tanaman
034	Alat-Alat Berat
035	Hewan
036	Barang Persediaan Dalam Gedung
037	Alat Pengangkut (Darat, Laut, Udara)
038	Peralatan Pabrik , Laboratorium
039	Peralatan Kesehatan / Medis (Rumah Sakit, Balai Pengobatan)
040	PERPUSTAKAAN / DOKUMEN / KEARSIPAN / SANDI
041	Perpustakaan
041.1	Pameran Bahan Perpustakaan
041.2	Pengolahan (Katalog, Bibliografi)
041.3	Sirkulasi / Layanan
041.31	Keanggotaan
041.32	Peminjaman dan Pengembalian
041.4	Deposit
041.5	Pemeliharaan, Pelestarian / Alih Media
041.6	Pembinaan Perpustakaan
041.61	Bantuan Buku, Rak
041.7	Penghapusan/ Penyusunan Bahan Perpustakaan
041.8	Jenis-Jenis Perpustakaan (Umum, Khusus, PT, Sekolah, Keliling, Masyarakat)
041.9	Kemitraan, Forum Perpustakaan, Kerjasama antar Perpustakaan

042	Dokumentasi
043	-
044	-
045	Kearsipan
045.1	Pola Klasifikasi
045.2	Akuisisi Arsip
045.3	Penyusutan Arsip
045.31	Jadwal Retensi Arsip
045.32	Penilaian Arsip
045.33	Pemindahan Arsip
045.34	Penyerahan Arsip
034.35	Pemusnahan Arsip
045.4	Pembinaan Kearsipan
045.41	Pengawasan
045.42	Bimbingan Kearsipan
045.5	Pemeliharaan, Pelestarian / Konservasi Arsip
045.51	Fumigasi dan Termit Control
045.52	Laminasi
045.53	Alih Media
045.6	Layanan
045.7	Pemasyarakatan
045.71	Pameran
045.72	Penerbitan Naskah Sumber Arsip
045.73	Sosialisasi Kearsipan
045.8	Pengembangan Sistem
045.81	Sistem Kearsipan
045.82	Sistem Jaringan Informasi Kearsipan
046	Sandi
047	Telegram, Telex, Radio, ISB
048	Data Elektronik
049	-
050	PERENCANAAN DAN EVALUASI Meliputi RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional), RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), Musrembang, Musrembangpus, antar Kementerian, Musrembangnas, Musrembangdes
050.1	RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional)
050.11	RENSTRA (Rencana Strategi)
050.12	RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
050.13	RENSTRA BAPPEDA
050.2	Program Nasional
050.21	RKP (Rencana Kerja Pembangunan)
050.22	RKA-KL (Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga)
050.23	RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah)
050.24	Rencana Kerja SKPD

050.25	<i>KUA (Kebijakan Umum Anggaran), KUPA (Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan PPAS (Penetapan Plafon Anggaran Sementara</i>
050.26	<i>Jawaban Gubernur Atas Pandangan Fraksi</i>
050.27	<i>Nota Keuangan</i>
050.28	<i>RKT (Rencana Kerja Tahunan)</i>
050.29	<i>RKO (Rencana Kerja Operasional)</i>
051	<i>Laporan</i>
051.1	<i>Laporan Berkala</i>
051.2	<i>LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)</i>
052	<i>Evaluasi</i>
052.1	<i>Evaluasi Rencana Strategis</i>
052.11	<i>Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah</i>
052.12	<i>Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah</i>
052.13	<i>Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah</i>
052.14	<i>Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota</i>
060	<i>ORGANISASI KETATALAKSANAAN</i>
061	<i>Organisasi</i>
061.1	<i>Susunan Organisasi dan Tata Kerja</i>
061.2	<i>Tata Tertib Kantor, Termasuk Pengaturan Hari dan Jam</i>
062	<i>Organisasi Badan Non Pemerintah</i>
063	<i>Organisasi Badan Pemerintah</i>
064	<i>Organisasi Semi Pemerintah</i>
065	<i>Ketatalaksanaan</i>
065.1	<i>Tata Naskah Dinas</i>
065.2	<i>Stempel Dinas dan Stempel jabatan</i>
065.3	<i>Papan nama instansi pemerintah / non pemerintah</i>
065.4	<i>Alamat-alamat Kantor dan Pejabat</i>
065.5	<i>Ketentuan Pakaian Dinas dan Atribut</i>
066	<i>Tata Hubungan Kerja</i>
067	<i>Standart Operasional Prosedur</i>
068	<i>Evaluasi dan Laporan Ketatalaksanaan</i>
069	<i>Analisis Jabatan</i>
069.1	<i>Pengukuran / Penilaian beban kerja Jabatan Struktural dan</i>
069.2	<i>Uraian Jabatan</i>
070	<i>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</i>
071	<i>Riset meliputi Perijinan Bagi Peneliti, Riset Design, Pembahasan</i>
072	<i>Pengembangan</i>
072.1	<i>Krenova (Kreatifitas dan Inovasi Masyarakat)</i>
072.2	<i>SINAS (Sistem Inovasi Nasional)</i>
072.3	<i>SIDA (Sistem Inovasi Daerah) meliputi Cluster, Kab/ Kota,</i>
072.4	<i>Inkubator Tehnologi dan Bisnis</i>
072.5	<i>Pameran Produk Inovasi / Ristek</i>
072.6	<i>BTC (Bisnis Tehnologi Center)</i>
072.7	<i>Raptek (Penerapan Iptek)</i>
072.8	<i>HKI (Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual)</i>

073	Kajian
073.1	Kajian Strategis / Diskusi / Forum Group Discussion (FGD)
073.2	Seminar
073.3	Workshop
073.4	Rapat Koordinasi / Rapat Teknis
073.5	Lokakarya
073.6	Diseminasi / Sosialisasi Hasil Penelitian
074	Kerjasama Penelitian
074.1	Instensi Pemerintah Pusat / Daerah
074.2	Perguruan Tinggi Negeri / Swasta
074.3	Lembaga Swasta Nasional, Lembaga Swadaya Masyarakat
074.4	Lembaga Internasional
075	Perekayasaan
076	Jarlitbang (Jaringan Penelitian dan Pengembangan)
077	Publikasi Ilmiah
077.1	Jurnal Ilmiah
080	KONFERENSI / RAPAT KOORDINASI
081	Gubernur
082	Bupati / Walikota
083	Komponen Eselon Lainnya (termasuk Pimpinan SKPD)
084	Instansi Lainnya (diluar Kemendagri)
085	Internasional di Dalam Negeri
086	Internasional di Luar Negeri
090	PERJALANAN DINAS
091	Perjalanan Presiden / Wakil Presiden ke Daerah
092	Perjalanan Menteri ke Daerah
093	Perjalanan Pejabat Tinggi (Pejabat Eselon I)
094	Perjalanan PNS, meliputi Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat
095	Perjalanan Tamu Asing ke Daerah
096	Perjalanan Presiden / Wakil Presiden ke Luar Negeri
097	Perjalanan Menteri ke Luar Negeri
098	Perjalanan Pejabat Tinggi ke Luar Negeri
099	Perjalanan Pegawai ke Luar negeri
100	PEMERINTAHAN
110	PEMERINTAHAN PUSAT
111	Presiden, meliputi : Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan,
111.1	Penanggung Jawaban Presiden Kepada MPR
111.2	Amanat Presiden / Amanat Kenegaraan
112	Wakil Presiden, meliputi : Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan,
113	Susunan Kabinet
113.1	Reshuffle
113.2	Penunjukan Menteri ad Intren
113.3	Sidang Kabinet, Sidang Stabilitas Ekonomi, lihat 500.1
114	Kementerian Dalam Negeri
114.1	Amanat Menteri Dalam Negeri
115	Kementrian Lainnya

116	<i>Lembaga Tinggi Negara (DPA, MA, BPK)</i>
117	<i>Lembaga Non Kementerian</i>
118	<i>Otonomi Daerah</i>
119	<i>Kerjasama Antar Kementrian</i>
120	<i>PEMERINTAH PROVINSI</i>
120.01	<i>Kebijakan Pemerintah Provinsi</i>
120.02	<i>Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Gubernur (LKPJ)</i>
120.03	<i>Monografi, tambahan kode wilayah</i>
120.1	<i>Koordinasi</i>
120.11	<i>Satuan Kerja Perangkat Daerah</i>
120.12	<i>Instansi Vertikal</i>
120.13	<i>Kerjasama antar Provinsi / Daerah dan Luar Negeri</i>
121	<i>Gubernur, meliputi : Pencalonan, Pengangkatan, pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan dan sebagainya.</i>
122	<i>Wakil Gubernur, meliputi : Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan dan sebagainya</i>
123	<i>Sekretaris Daerah, meliputi : Pencalonan, Serah Terima Jabatan</i>
124	<i>Badan-badan Pertimbangan Daerah, meliputi : Muspida</i>
125	<i>Pembentukan / Pemekaran</i>
125.1	<i>Pembentukan Daerah Otonom</i>
125.2	<i>Pembentukan Wilayah</i>
125.3	<i>Perubahan Batas Wilayah</i>
125.4	<i>Pemekaran Wilayah</i>
125.5	<i>Permasalahan Batas Wilayah</i>
125.6	<i>Pemindahan Ibu Kota Provinsi</i>
125.7	<i>Pemberian dan Penggantian Nama Kota, Daerah, Jalan</i>
126	<i>Pembagian Wilayah</i>
127	<i>Penyerahan Urusan</i>
130	<i>PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA</i>
130.01	<i>Kebijakan Pemerintah Kabupaten / Kota</i>
130.02	<i>Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Bupati / Walikota (LKPJ)</i>
130.03	<i>Monografi</i>
130.1	<i>Koodinasi</i>
130.11	<i>Satuan Kerja Perangkat Daerah</i>
130.12	<i>Instansi Vertikal</i>
130.13	<i>Kerjasama Antar Provinsi / Daerah, dan Luar Negeri (Sister City)</i>
131	<i>Bupati / Walikota, meliputi : Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan dan sebagainya</i>
132	<i>Wakil Bupati / Walikota, meliputi : Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan dan sebagainya</i>
133	<i>Sekretaris Daerah, meliputi : Pencalonan, Serah Terima Jabatan</i>
134	<i>Forum Koordinasi Pemerintah di Daerah, meliputi : Muspida</i>
135	<i>Pembentukan Daerah</i>
135.1	<i>Pembentukan Daerah Otonom</i>

135.2	<i>Pembentukan Wilayah</i>
135.3	<i>Perubahan Batas Wilayah</i>
135.4	<i>Pemekaran Wilayah</i>
135.5	<i>Permasalahan Batas Wilayah</i>
135.6	<i>Pemindahan Ibukota Kabupaten / Kota</i>
135.7	<i>Pemberian dan Penggantian nama Kota, Daerah , jalan</i>
136	<i>Pembagian Wilayah</i>
137	<i>Penyerahan Urusan</i>
138	<i>Pemerintahan Wilayah Kecamatan</i>
138.1	<i>Pembentukan Kecamatan</i>
138.2	<i>Pemekaran Kecamatan</i>
138.3	<i>Perluasan / Perubahan Batas Wilayah Kecamatan</i>
138.4	<i>Pemindahan Ibu Kota Kecamatan</i>
138.5	<i>Laporan Kecamatan</i>
140	PEMERINTAHAN DESA / KELURAHAN
141	<i>Pamong Desa</i> <i>Meliputi : Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara, Pelantikan, Serah Terima, Penghasilan dsb</i>
142	<i>Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa / Kelurahan (APBDes / Kelurahan)</i>
143	<i>Kekayaan Desa : bondo desa, tanah bengkok dll</i>
144	<i>Lembaga Tingkat Desa : Rembug Desa, Badan Permusyawaratan Desa, LKMD</i>
145	<i>Administrasi Desa / Kelurahan : Monografi, Peta Rupa Bumi dll</i>
146	<i>Kewilayahan</i>
146.1	<i>Pembentukan Desa / Kelurahan</i>
146.2	<i>Pemekaran Desa / Kelurahan</i>
146.3	<i>Perubahan dan Perluasan Batas Wilayah Desa / Kelurahan</i>
146.4	<i>Perubahan Nama Desa / Kelurahan</i>
146.5	<i>Permasalahan Batas Desa / Kelurahan</i>
146.6	<i>Penyatuan Desa / Kelurahan</i>
146.7	<i>Penghapusan Desa / Kelurahan</i>
147	RT-RW
150	LEGISLATIF MPR / DPR / DPD
151	Keanggotaan MPR
151.1	<i>Pencalonan</i>
151.2	<i>Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah</i>
151.3	<i>Pemberhentian</i>
151.31	<i>Recall</i>
151.32	<i>Meninggal</i>
151.4	<i>Pelanggaran</i>
151.5	<i>Pergantian Antar Waktu</i>
152	Keanggotaan DPR
152.1	<i>Pencalonan</i>
152.2	<i>Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah</i>
152.3	<i>Pemberhentian</i>
152.31	<i>Recall</i>

152.32	<i>Meninggal</i>
152.4	<i>Pelanggaran</i>
152.5	<i>Pergantian Antar Waktu</i>
153	<i>Keanggotaan DPD</i>
153.1	<i>Pencalonan</i>
153.2	<i>Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah</i>
154	<i>Persidangan</i>
155	<i>Kesejahteraan</i>
155.1	<i>Keuangan</i>
155.2	<i>Penghargaan</i>
156	<i>Hak</i>
157	<i>Jawaban Pemerintah</i>
158	<i>Peninjauan / Kunjungan Lapangan</i>
159	<i>Kunjungan Kerja / Study Banding / Konsultasi</i>
160	<i>DPRD PROVINSI</i>
161	<i>Keanggotaan</i>
161.1	<i>Pencalonan</i>
161.2	<i>Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah</i>
161.3	<i>Pelanggaran</i>
161.4	<i>Pemberhentian Antar Waktu</i>
161.41	<i>Meninggal Dunia</i>
161.42	<i>Mengundurkan Diri</i>
161.43	<i>Diberhentikan</i>
161.5	<i>Alat Kelengkapan Dewan</i>
161.51	<i>Pimpinan</i>
161.52	<i>Badan Musyawarah</i>
161.53	<i>Komisi</i>
161.54	<i>Badan Legislasi Daerah</i>
161.55	<i>Badan Anggaran</i>
161.56	<i>Badan Kehormatan</i>
161.57	<i>Alat Kelengkapan Lain (Pansus)</i>
162	<i>Persidangan</i>
162.1	<i>Rapat-rapat</i>
162.11	<i>Rapat Paripurna, Rapat Paripurna Istimewa</i>
162.12	<i>Rapat Pimpinan DPRD</i>
162.13	<i>Rapat Badan Musyawarah, Rapat Badan Anggaran, Rapat Badan Legislasi, Rapat Badan Kehormatan, Rapat Pansus</i>
162.14	<i>Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Konsultasi</i>
162.15	<i>Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, Rapat Dengar Pendapat</i>
162.16	<i>Rapat Fraksi</i>
162.2	<i>Fraksi</i>
162.3	<i>Tata Tertip</i>
162.4	<i>Kode Etik</i>
162.5	<i>Reses</i>
162.6	<i>Peninjauan / Kunjungan Lapangan</i>
162.7	<i>Kunjungan Kerja / Study Banding / Konsultasi</i>

163	<i>Kesejahteraan</i>
163.1	<i>Keuangan</i>
163.2	<i>Penghargaan</i>
164	<i>Hak</i>
170	<i>DPRD KABUPATEN / KOTA</i>
171	<i>Keanggotaan</i>
171.1	<i>Pencalonan</i>
171.2	<i>Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah</i>
171.3	<i>Pelanggaran</i>
171.4	<i>Pemberhentian Antar Waktu</i>
171.41	<i>Meninggal Dunia</i>
171.42	<i>Mengundurkan Diri</i>
171.43	<i>Diberhentikan</i>
171.5	<i>Alat Kelengkapan Dewan</i>
171.51	<i>Pimpinan</i>
171.52	<i>Badan Musyawarah</i>
171.53	<i>Komisi</i>
171.54	<i>Badan Legislasi Daerah</i>
171.55	<i>Badan Anggaran</i>
171.56	<i>Badan kehormatan</i>
171.57	<i>Alat Kelengkapan Lain (Pansus)</i>
172	<i>Persidangan</i>
172.1	<i>Rapat-Rapat</i>
172.11	<i>Rapat Paripurna, Rapat Paripurna Istimewa</i>
172.12	<i>Rapat Pimpinan DPRD</i>
172.13	<i>Rapat Badan Musyawarah, Rapat Badan Anggaran, Rapat Badan Legislasi, Rapat Badan Kehormatan, Rapat Pansus</i>
172.14	<i>Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Konsultasi</i>
172.15	<i>Rapat kerja, Rapat Dengar Pendapat, Rapat Dengar Pendapat Umum, Rapat Pemandangan Umum</i>
172.16	<i>Rapat Fraksi</i>
172.2	<i>Fraksi</i>
172.3	<i>Tata Tertib</i>
172.4	<i>Kode Etik</i>
172.5	<i>Reses</i>
172.6	<i>Peninjauan / Kunjungan Lapangan</i>
172.7	<i>Kunjungan Kerja / Study Banding / Konsultasi</i>
173	<i>Kesejahteraan</i>
173.1	<i>Keuangan</i>
173.2	<i>Penghargaan</i>
174	<i>Hak</i>
180	<i>HUKUM</i>
180.1	<i>Konstitusi</i>
180.11	<i>Dasar Negara</i>
180.12	<i>Undang-Undang Dasar</i>
180.13	<i>Undang-Undang</i>

180.14	Peraturan Pemerintah
180.15	Keppres / Perpres / Inpres
180.16	Kepmen / Permen / Inmen
180.17	Perundangan Tingkat Provinsi meliputi : Perda, KepGub/ PerGub/ InGub
180.18	Perundangan Tingkat Kabupaten/Kota meliputi : Perda, KepBup/ KepWal, PerBup/ PerWal
180.19	Perundangan Tingkat Desa meliputi : Peraturan Desa, Keputusan Kepala Desa
180.2	Tap MPR
180.3	Konvensi
181	Perdata
181.1	Tanah
181.2	Rumah
181.3	Utang/ Piutang
181.31	Gadai
181.32	Hipotik
181.4	Notariat
182	Pidana
182.1	Tindak Pidana Umum
182.2	Tindak Pidana Khusus
183	Peradilan
183.1	Jenis-jenis Peradilan
183.11	Peradilan Umum
183.111	Peradilan Negeri Tingkat Pertama
183.112	Peradilan Tinggi
183.113	Mahkamah Agung
183.12	Peradilan Agama Islam
183.121	Pengadilan Agama Islam Tingkat Pertama
183.122	Pengadilan Tinggi Agama Islam
183.123	Mahkamah Islam Agung
183.13	Peradilan Militer
183.131	Mahkamah Militer Tingkat Pertama
183.132	Mahkamah Militer Tinggi
183.133	Mahkamah Militer Agung
183.14	Peradilan Tata Usaha Negara
183.141	Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama
183.142	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
183.143	Mahkamah Tata Usaha Negara Agung
183.15	Peradilan Tindak Pidana Korupsi
183.16	Peradilan Hak Asasi Manusia
183.17	Mahkamah Konstitusi
183.18	Komisi Yudisial
183.19	Ombustman
183.2	Upaya Hukum
183.21	Banding
183.22	Kasasi

183.23	<i>Derden Verset</i>
183.24	<i>Peninjauan Kembali</i>
183.25	<i>Grasi, Amnesti, Abolisi</i>
183.3	<i>Eksekusi</i>
183.4	<i>Pembinaan Hukum, meliputi : kadarkum</i>
183.5	<i>Bantuan. Hukum, meliputi : LBH</i>
184	<i>Hukum Internasional</i>
185	<i>Imigrasi</i>
185.1	<i>Visa</i>
185.2	<i>Paspor</i>
185.3	<i>Exit</i>
185.4	<i>Reentry</i>
185.5	<i>Lintas Batas/ Batas Antar Negara</i>
186	<i>Kepenjaraan</i>
186.1	<i>Registrasi Narapidana</i>
186.2	<i>Pembinaan Narapidana</i>
186.3	<i>Pembebasan Narapidana</i>
186.4	<i>Tahanan Titipan</i>
187	<i>Kejaksaan</i>
187.1	<i>Penuntutan Umum</i>
187.2	<i>Penuntutan Khusus</i>
188	<i>Hukum Adat</i>
190	<i>HUBUNGAN LUAR NEGERI</i>
191	<i>Perwakilan Asing</i>
192	<i>Tamu Negara</i>
193	<i>Kerjasama Diplomatik dengan Negara Asing</i>
194	<i>Perwakilan RI di Luar Negeri</i>
195	<i>PBB</i>
196	<i>Laporan Luar Negeri</i>
200	<i>POLITIK</i>
201	<i>Perencanaan dan Program Pembinaan Politik Luar Negeri</i>
201.1	<i>Pembinaan dan Pemahaman Ideologi Negara</i>
201.2	<i>Kesatuan Bangsa</i>
201.3	<i>Pelaksanaan Pembinaan Politik Dalam Negeri termasuk laporannya</i>
201.4	<i>Keadaan Politik Luar Negeri</i>
201.5	<i>Evaluasi dan Pengawasan Pembinaan Ipoleksosbud hankam</i>
201.6	<i>Orde Baru</i>
201.7	<i>Orde Reformasi</i>
210	<i>KEPARTAIAN</i>
211	<i>Partai Politik</i>
211.1	<i>Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PARPOL</i>
211.2	<i>Program Kerja, data Kegiatan PARPOL</i>
211.3	<i>Pembinaan PARPOL</i>
211.4	<i>Hasil Munas / Musda PARPOL</i>

211.5	<i>Sruktur/ Kepengurusan, Pengkaderan dan Keanggotaan PARPOL</i>
211.6	<i>Data Inventaris dan Keuangan PARPOL</i>
212	<i>Partai/ Organisasi Terlarang</i>
212.1	<i>Keputusan Pembubaran partai/ Organisasi Terlarang</i>
212.2	<i>Daftar dan data pengurus anggota partai / Organisasi Terlarang</i>
212.3	<i>Ijin Meninggalkan Tempat / Domisili Bagi Anggota Partai/ Organisasi Terlarang</i>
212.4	<i>Daftar Berkala Mengenai Keadaan Anggota Partai/ Organisasi Terlarang</i>
212.5	<i>Laporan Umum Mengenai Keadaan Anggota Partai/ Organisasi Terlarang</i>
220	<i>ORGANISASI KEMASYARAKATAN</i>
221	<i>Pembentukan Organisasi</i>
221.1	<i>Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga</i>
221.2	<i>Kepengurusan dan Daftar Anggota Organisasi</i>
221.3	<i>Program Kerja Organisasi</i>
221.4	<i>Munas/ Musda Provinsi dan Kabupaten / Kota</i>
222	<i>Pembinaan Organisasi</i>
222.1	<i>Kegiatan Organisasi dan Pelaporannya</i>
222.2	<i>Daftar Inventaris Kekayaan Organisasi</i>
230	<i>ORGANISASI PROFESI DAN FUNGSIONAL</i>
231	<i>Pembentukan Organisasi</i>
231.1	<i>Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga</i>
231.2	<i>Kepengurusan dan Daftar Anggota Organisasi</i>
231.3	<i>Program Kerja Organisasi</i>
231.4	<i>Munas / Musda Provinsi dan Kabupaten / Kota</i>
232	<i>Pembinaan Organisasi</i>
232.1	<i>Kegiatan Organisasi dan Pelaporannya</i>
232.2	<i>Daftar Inventaris Kekayaan Organisasi</i>
240	<i>ORGANISASI PEMUDA</i>
241	<i>Pembentukan Organisasi</i>
241.1	<i>Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga</i>
241.2	<i>Kepengurusan dan Daftar Anggota Organisasi</i>
241.3	<i>Program Kerja Organisasi</i>
241.4	<i>Munas / Musda Provinsi dan Kabupaten / Kota</i>
242	<i>Pembinaan Organisasi</i>
242.1	<i>Kegiatan Organisasi dan Pelaporannya</i>
242.2	<i>Daftar Inventaris Kekayaan Organisasi</i>
250	<i>ORGANISASI BURUH, TANI DAN NELAYAN</i>
251	<i>Pembentukan Organisasi</i>
251.1	<i>Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga</i>
251.2	<i>Kepengurusan dan Daftar Anggota Organisasi</i>
251.3	<i>Program Kerja Organisasi</i>
251.4	<i>Munas / Musda Provinsi dan Kabupaten / Kota</i>
252	<i>Pembinaan Organisasi</i>
252.1	<i>Kegiatan Organisasi dan Pelaporannya</i>

252.2	<i>Daftar Inventaris Kekayaan Organisasi</i>
260	ORGANISASI WANITA
261	<i>Pembentukan Organisasi</i>
261.1	<i>Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga</i>
261.2	<i>Kepengurusan dan Daftar Anggota Organisasi</i>
261.3	<i>Program Kerja Organisasi</i>
261.4	<i>Munas / Musda Provinsi dan Kabupaten / Kota</i>
262	<i>Pembinaan Organisasi</i>
261.1	<i>Kegiatan Organisasi dan Pelaporannya</i>
262.2	<i>Daftar Inventaris Kekayaan Organisasi</i>
270	PEMILU (PEMILIHAN UMUM), PILKADA (PEMILIHAN KEPALA DAERAH)
271	<i>Pencalonan</i>
272	<i>Nomor Urut / Tanda Gambar</i>
273	<i>Kampanye</i>
273.1	<i>Dana Kampanye</i>
274	<i>Petugas Pemilu</i>
275	<i>Pemilih / Daftar Pemilih</i>
276	<i>Sarana</i>
276.1	<i>TPS</i>
276.2	<i>Kendaraan</i>
276.3	<i>Surat Suara</i>
276.4	<i>Kotak Suara</i>
277	<i>Pemungutan Suara / Penghitungan Suara</i>
278	<i>Hasil Pemilu</i>
278.1	<i>Penetapan Terpilih dan Pembagian Kursi Anggota Legislatif</i>
278.2	<i>Penetapan Pemenang Pilkada</i>
279	<i>KPU / KPUD</i>
280	PENGAWASAN PEMILU / PILKADA
281	<i>Pemantauan</i>
282	<i>Pelanggaran</i>
283	<i>Sengketa</i>
284	<i>Panwaslu</i>
300	KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM
300.1	<i>Kebijakan Pemerintah Mengenai Situasi dan Kondisi Keamanan</i>
300.2	<i>Pembinaan dan Pengaturan Mengenai Larangan</i>
300.3	<i>Pencegahan dan Penanggulangan Gangguan/Ancaman</i>
300.4	<i>Program Kerja serta Tata Cara Penanggulangan Keamanan</i>
301	<i>Koordinasi dan Kerjasama Keamanan dan Ketertiban Umum</i>
302	<i>Pengawasan Trantibum</i>
303	<i>Penegakan Pelaksanaan Perda</i>
304	<i>Pembinaan / Penyuluhan Pelanggaran Perda</i>
305	<i>Patroli Wilayah</i>
306	<i>Laporan Kunjungan VIP, VVIP, Tamu Asing</i>
306.1	<i>Pengamanan</i>
306.2	<i>Pengawalan</i>

307	<i>Pemberitahuan Keadaan Bahaya dan Jam Malam meliputi : Pemberitahuan, Ketentuan dan Pelaksanana dan Pengawasan</i>
310	<i>PERTAHANAN</i>
311	<i>Darat</i>
312	<i>Laut</i>
313	<i>Udara</i>
314	<i>Ketahanan Bangsa</i>
315	<i>Ketahanan Ekonomi</i>
316	<i>Ketahanan Seni dan Budaya, Agama dan Kemasyarakatan</i>
320	<i>KEMELITERAN/TNI</i>
321	<i>Latihan Militer</i>
322	<i>Wajib MiliMer</i>
323	<i>Operasi militer</i>
324	<i>Kekayaan TNI</i>
325	<i>Kemanunggalan TNI Dengan Rakyat</i>
330	<i>KEAMANAN</i>
331	<i>Kepolisian</i>
331.1	<i>Polisi Pamong Praja</i>
332	<i>Huru Hara/Demonstrasi</i>
333	<i>Senjata Api/Tajam</i>
334	<i>Bahan Peledak</i>
335	<i>Perjudian</i>
336	<i>Surat-surat Kaleng</i>
337	<i>Pengaduan Masyarakat</i>
338	<i>Himbauan/Larangan</i>
340	<i>PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)</i>
340.1	<i>Kebijaksanaan Pemerintah Mengenai Pembentukan Linmas</i>
341	<i>Pembinaan dan Diklat</i>
341.1	<i>Pengangkatan/Pemberhentian Anggota Linmas</i>
341.2	<i>Pendidikan/Latihan Linmas</i>
341.3	<i>Latihan PAM Swakarsa</i>
341.4	<i>Pendidikan/Latihan MENWA</i>
342	<i>Pengerahan dan Pengendalian Linmas</i>
343	<i>Kesejahteraan Bagi Anggota Linmas</i>
343.1	<i>Pemberian Tali Asih Bagi Anggota Linmas</i>
343.2	<i>Bantuan Modal Usaha Bagi Anggota Linmas</i>
343.3	<i>Santunan Uang Duka Bagi Anggota Linmas</i>
343.4	<i>Penghargaan Bagi Anggota Linmas</i>
344	<i>Data Linmas, MENWA, PAM Swakarsa</i>
344.1	<i>Linmas Lanjut Usia</i>
345	<i>Orientasi Kesadaran Bela Negara</i>
346	<i>Kegiatan Pelaksanaan Linmas</i>
350	<i>KEJAHATAN</i>
351	<i>Makar/Pemberontakan/Terrorisme</i>
352	<i>Pembunuhan</i>
353	<i>Penganiyaan/Pencurian/Perampasan</i>

354	Subversi/ Penyeludupan/ Narkotika
355	Penipuan dan Pemalsuan
356	Korupsi/ Penyelewengan/ Penyalahgunaan Jabatan
357	Kekerasan Pada Perempuan dan Anak
357.1	Pelaporan
357.2	Penanganan Korban
358	Kenakalan
359	Kejahatan Lainnya (Traficking, Hipnotis, dll)
360	BENCANA
360.1	Pelatihan
360.2	Surat Keputusan
360.3	Berita Acara
361	Gunung Merapi/ Gempa/ Tsunami
362	Banjir/ Tanah Longsor
363	Angin Topan
364	Kebakaran
364.1	Pemadam Kebakaran
365	Kekeringan
366	Posko Bencana
367	Koordinasi/ Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana
368	MOU Pemerintah Pusat BNPB
370	KECELAKAAN
371	Latihan SAR
372	Latihan Keterampilan Penyelamatan di Air dan Menyelam
373	Latihan Managemen bagi Pejabat
374	Satkorlat dan Satlak PBP
375	Pelatihan Kemampuan Pusdalop Bagi Aparat PBP
376	Latihan Keterampilan Pemadam Kebakaran
377	Kecelakaan Darat, Laut, Udara
378	Investigasi/ Penyelidikan Kecelakaan
379	Asuransi Kecelakaan
380	PENDAMPINGAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
381	Perencanaan
381.1	Perencanaan Teknis
381.2	Rekomendasi
382	Bantuan Bencana
383	Penanggulangan Bencana Dengan Pihak Lain
384	Sarana prasara Rehabilitasi dan Rekonstruksi
385	PUSDALOPS
386	Kunjungan Lapangan
387	Relawan
388	Laporan Bencana
390	KERJASAMA BPBD DENGAN INSTANSI LAIN
391	Instansi Pemerintah Pusat
392	Instansi Pemerintah di Daerah
393	Lembaga International

394	<i>Lembaga Non Pemerintah Nasional</i>
400	<i>KESEJAHTERAAN RAKYAT</i>
401	<i>Kebijakan dan Program Pemerintah Untuk Kesejahteraan Rakyat</i>
410	<i>BANGUNAN DESA/KELURAHAN</i>
411	<i>Gotong Royong</i>
411.1	<i>Swadaya Gotong Royong</i>
411.11	<i>Pembinaan</i>
411.12	<i>Pungutan</i>
411.2	<i>Lembaga Sosial Desa (LSD)</i>
411.3	<i>Latihan kerja Masyarakat</i>
411.4	<i>Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)</i>
411.5	<i>Penyuluhan Masyarakat Desa</i>
411.6	<i>Kelembagaan Desa</i>
411.7	<i>Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)</i>
412	<i>Perekonomian Desa</i>
412.1	<i>Produksi Desa</i>
412.11	<i>Pengolahan</i>
412.12	<i>Pemasaran</i>
412.2	<i>Pembiayaan Pembangunan Desa</i>
412.21	<i>Inventarisasi Data</i>
412.22	<i>Petunjuk/Pembinaan Pelaksanaan</i>
412.23	<i>Pelaksanaan dan Perkembangan Pembangunan</i>
412.24	<i>Bantuan/Stimulasi</i>
412.25	<i>Perkreditan Desa</i>
412.26	<i>Pelaporan</i>
412.27	<i>Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP)</i>
412.3	<i>Koperasi Desa</i>
412.31	<i>Badan Usaha Unit Desa (BUUD)</i>
412.32	<i>Koperasi Unit Desa (KUD)</i>
413	<i>Sarana dan Prasarana Desa</i>
413.1	<i>Pemukiman Kembali Penduduk</i>
413.2	<i>Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa</i>
413.3	<i>Perbaikan Kampung</i>
413.4	<i>Teknologi Tepat Guna (TTG)</i>
414	<i>Pengembangan Desa</i>
414.1	<i>Perlombaan Desa dan Kelurahan</i>
414.11	<i>Pedoman</i>
414.12	<i>Penilaian</i>
414.13	<i>Kejuaraan</i>
415	<i>Koordinasi</i>
415.1	<i>Kerjasama</i>
414.11	<i>Luar Negeri</i>
415.12	<i>Perguruan Tinggi</i>
415.13	<i>Kementerian/Lembaga Pemerintah</i>
415.14	<i>Lembaga Lainnya</i>

420	PENDIDIKAN
420.1	Kebijakan dan Program Pemerintah Untuk Pendidikan
420.2	Pendidikan Karakter Bangsa, Wawasan Kebangsaan, Jiwa Nasionalisme dsb
420.3	Pendidikan Kemasyarakatan
421	Sekolah (termasuk akreditasi)
421.1	Pra Sekolah (PAUD, Playgroup)
421.2	Sekolah Dasar
421.3	Sekolah Menengah
421.4	Sekolah Kejuruan
421.5	Perguruan Tinggi (Sekolah Tinggi, Akademi, Universitas, dll)
421.6	Kegiatan Sekolah meliputi : Dies Natalis, Lustrum
421.7	Kegiatan Pelajar diantaranya Reuni, Darmawisata, Widyawisata Lomba-lomba (LKS, Olimpiade Sains, Olimpiade Olahraga dan Sains), Pelajar Teladan, Pertukaran Pelajar
421.8	Sekolah Pendidikan Luar Biasa
421.9	Pendidikan Luar Sekolah/Pemberantasan Buta Huruf
422	Administrasi Sekolah
422.1	Persyaratan Masuk Sekolah, Testing, Ujian, OSPEK
422.2	Tahun Pelajaran
422.3	Hari Libur
422.4	Uang Sekolah, diantaranya SPP, SPI
422.5	Bea Siswa dan Penghargaan Siswa Berprestasi
422.6	Ijazah, Sertifikat
422.7	Bantuan Pendidikan : Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bantuan Khusus Murid (BKM), Bantuan Siswa Miskin (BSM)
423	Metode Belajar
423.1	Kuliah
423.2	Ceramah, Simposium, Seminar
423.3	Diskusi
423.4	Kuliah Lapangan, KKN, Magang/Praktek/PKL
423.5	Kurikulum
423.6	Karya Tulis, Karya Ilmiah
423.7	Ujian
424	Tenaga Pengajar (Guru, Dosen, Guru/Dosen teladan, Guru/
424.1	Pertukaran Guru ke Luar Negeri
424.2	Sertifikasi Guru
425	Sarana Pendidikan
425.1	Bangunan Pendidikan
425.11	Gedung Sekolah
425.12	Kampus
425.13	Pusat Kegiatan
425.14	Perpustakaan
425.15	Laboratorium
425.2	Buku
425.3	Perlengkapan Pendidikan
425.4	Sistem Informasi Pendidikan

425.5	<i>Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan</i>
426	<i>KEOLAHRAGAAN</i>
426.1	<i>Pembinaan Keolahragaan</i>
426.11	<i>Olah raga Prestasi (PON, Sea Games, Kejurnas, Olympiade)</i>
426.12	<i>Olah raga Pendidikan (POPDA SD, Porseni dll)</i>
426.13	<i>Olah raga Rekreasi / Massal (Senam, Sepeda Santai, Olahraga Tradisional)</i>
426.14	<i>Iptek dan Industri Olah raga</i>
426.15	<i>Sarana Prasarana Keolahragaan</i>
426.2	<i>Kemitraan Olah Raga</i>
427	<i>KEPEMUDAAN</i>
427.1	<i>Pertukaran Pemuda</i>
427.2	<i>Paskibraka</i>
427.3	<i>Sarana Prasarana Kepemudaan, meliputi : Sarana Kegiatan Remaja, Gelanggang Remaja</i>
427.4	<i>Kemitraan Pemuda</i>
427.5	<i>Karang Taruna</i>
428	<i>Kepramukaan/Kepanduan</i>
430	<i>KEBUDAYAAN</i>
430.1	<i>Kebijakan dan Program Pemerintah Untuk Kebudayaan</i>
430.2	<i>Pembinaan Bidang Kebudayaan</i>
431	<i>Kesenian</i>
431.1	<i>Cabang Kesenian (Seni Pewayangan, Seni Tari, Seni Musik, Seni Rupa, Seni Lukis dll)</i>
431.2	<i>Sarana</i>
431.21	<i>Gedung Kesenian</i>
431.22	<i>Padepokan</i>
431.23	<i>Lembaga Adat</i>
431.24	<i>Kegiatan Adat/Tradisi</i>
431.3	<i>Usaha Pertunjukan, Hiburan, Kesenangan : Festival , Pentas Seni</i>
432	<i>Kepurbakalaan</i>
432.1	<i>Museum</i>
432.2	<i>Peninggalan Kuno</i>
432.21	<i>Candi, termasuk Pemugaran</i>
432.22	<i>Benda</i>
433	<i>Sejarah</i>
434	<i>Bahasa</i>
435	<i>Penghayat Kepercayaan</i>
440	<i>KESEHATAN</i>
440.1	<i>Kebijakan dan Program Pemerintah Untuk Kesehatan</i>
441	<i>Pembinaan Kesehatan</i>
441.1	<i>Gigi</i>
441.2	<i>Mata</i>
441.3	<i>Jiwa</i>
441.4	<i>Kanker</i>
441.5	<i>UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)</i>

441.6	Perawatan
441.7	Kesehatan Masyarakat meliputi :PKM, Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat melalui : Media PKK, Posyandu, dsb
441.8	Kesehatan Ibu dan Anak
441.9	JPSBK (Jaminan Pengaman Sosial Bidang Kesehatan)
441.91	JAMKESMAS
441.92	JAMKESDA
441.93	JAMPERSAL
441.94	Jaminan Lainnya
442	Obat-obatan
442.1	Pengadaan
442.2	Pemeriksaan Obat
442.3	Penyimpanan Obat
442.4	Distribusi Obat
442.5	Pengawasan Obat
442.51	Obat Generik
442.52	Obat Terlarang
442.53	Pemalsuan Obat
443	Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit
443.1	Pencegahan Penyakit
443.2	Pemberantasan Penyakit Menular Langsung (P.2.M.L)
443.21	Kusta
443.22	Kelamin, HIV, HIDS, IMS
443.23	Frambusia
443.24	T.B.C
443.25	Kolera
443.26	SARS, dan Jenis Penyakit Lainnya
443.3	Pemberantasan Penyakit Menular Sumber Binatang (P2B)
443.31	Malaria
443.32	Dengue Heemorrhagie Fever (DHF)
443.33	Filaria
443.34	Serangga
443.35	Rabies
443.36	Antrak
443.37	Leptosirosis
443.38	Chikungunya
443.39	Penyakit Lainnya
443.4	Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular
443.41	A. Pektoris
443.42	IMA (Irama Mastcmik Akut)
443.43	Hipertensi
443.44	Stroke
443.45	Diabetes Melitus
443.46	Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit CA.Serviks
443.47	Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit CA.Mammae
443.48	Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit CA.Hepar

443.49	<i>Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit CA.Paru, dan Penyakit Lainnya</i>
443.5	<i>Epidemiology dan Karantina (Epidka)</i>
443.51	<i>Imunisasi</i>
443.52	<i>Surveilanse</i>
443.53	<i>Pestisida</i>
443.54	<i>Pencemaran Udara</i>
443.55	<i>Jamban Keluarga</i>
443.56	<i>Kesehatan Institusi</i>
443.6	<i>Higiene Sanitasi</i>
443.61	<i>Tempat-tempat Pembuatan dan Penjualan Makanan Minuman (TPPMM); jasa boga</i>
443.62	<i>Sarana Air Minum</i>
443.63	<i>Pestisida, insektisida</i>
443.64	<i>Pencemaran</i>
443.65	<i>Jamban Keluarga, Sanitasi Rumah Tangga</i>
443.66	<i>Kesehatan Institusi, misal : Poskestren, Sanitasi Masjid dll</i>
443.67	<i>Higiene Sanitasi CA. Mammae</i>
443.68	<i>Higiene Sanitasi CA. Hepar</i>
443.69	<i>Higiene Sanitasi CA. Paru</i>
443.7	<i>Kejadian Khusus</i>
443.71	<i>Dekompensasi kordosis (Serangan jantung)</i>
443.72	<i>Asma</i>
443.73	<i>Psikosis</i>
443.74	<i>PPOM</i>
443.75	<i>Kecelakaan Lalu Lintas</i>
443.76	<i>Kejadian Luar Biasa (KLB)</i>
444	<i>Gizi dan Pengawasan Makanan</i>
444.1	<i>Kekurangan Makanan</i>
444.2	<i>Bahaya Kelaparan, Busung Lapar, Gizi Busuk</i>
444.3	<i>Keracunan Makanan</i>
444.4	<i>Menu Makanan Rakyat</i>
444.5	<i>Gondok Endemic (GAKI)</i>
445	<i>RSU, RSJ, RS Khusus</i>
445.1	<i>Pelayanan Medis (termasuk Surat Keterangan Berkaitan Dengan Kondisi Pasien, Visum)</i>
445.11	<i>Rawat Inap</i>
445.12	<i>Rawat Jalan</i>
445.13	<i>IGD</i>
445.14	<i>IBS</i>
445.15	<i>ICU</i>
445.16	<i>MCU (Medical Check Up)</i>
445.2	<i>Penunjang Medis</i>
445.21	<i>Farmasi</i>
445.22	<i>Rekam Medik</i>
445.23	<i>Radiologi</i>
445.24	<i>Gizi</i>

445.25	Laboratorium Klinik
445.26	Laboratorium Patologi Anatomi, Forensik
445.27	Bank Daerah Rumah Sakit
445.28	Sanitasi Rumah Sakit
445.29	CSSD / Laundry
445.3	Keperawatan
445.4	Komite Medik
445.5	SPI (Satuan Pengawas Internal)
445.6	Mutu Rumah Sakit
445.61	Akreditasi
445.62	ISO
445.63	PSBH (Problem Solving for Better Hospital)
445.64	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
445.7	IPAL (Instalasi Pengolahan Limbah)
445.8	Promosi Layanan Kesehatan
445.9	Kasus Hukum Rumah Sakit
446	Tenaga Medis
446.1	Perencanaan Tenaga Medis
446.2	Pendayagunaan Tenaga Medis
446.21	Perijinan Untuk Tenaga Medis
446.22	Kegiatan Bhakti Sosial Tenaga Medis
446.23	TKHI (Tenaga Kesehatan Haji Indonesia)
446.3	Diklat Tenaga Kesehatan / Medis
446.4	Diklat Tenaga Kesehatan / Para Medis
446.5	Pendidikan di Bidang Kesehatan termasuk Pendidikan Spesialis
447	Peralatan Kesehatan
447.1	Standarisasi
447.2	Penyimpanan
447.3	Distribusi
447.4	Perijinan Berkaitan Dengan Alat Kesehatan
448	Pengobatan Alternatif
448.1	Pijat
448.2	Akupunktur
448.3	Jamu dan Herbal
448.4	Dukun
449	Lembaga Penyedia Layanan Kesehatan
449.1	PUSKESMAS dan PUSKESMAS Keliling
449.2	Poliklinik dan Balai Kesehatan
449.3	Rumah Bersalin
449.4	Posyandu
449.5	Laboratorium Kesehatan
449.6	Apotik
449.7	Sanatorium Kesehatan
450	AGAMA

450.1	<i>Kebijakan dan Program Pemerintah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Bidang Keagamaan</i>
450.2	<i>Bantuan di Bidang Keagamaan</i>
451	<i>Islam</i>
451.1	<i>Peribadatan</i>
451.11	<i>Sholat</i>
451.12	<i>Zakat, Infaq, Shodaqoh</i>
451.13	<i>Puasa</i>
451.14	<i>Umroh dan Haji</i>
451.2	<i>Rumah Ibadah (Masjid, Musholla, Surau)</i>
451.3	<i>Tokoh Agama</i>
451.4	<i>Pendidikan Agama</i>
451.41	<i>Pendidikan Tinggi Agama</i>
451.42	<i>Menengah , MTs, MA</i>
451.43	<i>Dasar, Pra Sekolah, MI</i>
451.44	<i>Lembaga Pendidikan Non Formal (TPQ/ Madrasah Diniyah, Pondok Pesantren dll)</i>
451.45	<i>Sarana Pendidikan meliputi : Buku, Gedung Sekolah dll</i>
451.46	<i>Tenaga Pengajar</i>
451.47	<i>Dakwah (Pengajian, MTQ)</i>
451.5	<i>Wakaf</i>
451.6	<i>Mazhab Agama Islam</i>
451.7	<i>Organisasi Keagamaan Bukan Politik (Majelis Ulama Indonesia, Dewan Hisab Rukyat dll)</i>
451.8	<i>Tokoh Agama, Rohaniawan (Da'i)</i>
452	<i>Kristen Protestan</i>
452.1	<i>Peribadatan</i>
452.2	<i>Rumah Ibadah Gereja dll</i>
452.3	<i>Tokoh Agama, Rohaniawan (Pendeta, Domine dll)</i>
452.4	<i>Mazhab Agama Kristen Protestan</i>
452.5	<i>Organisasi Gerejani</i>
453	<i>Khatolik</i>
453.1	<i>Peribadatan</i>
453.2	<i>Rumah Ibadah Gereja dll</i>
453.3	<i>Tokoh Agama, Rohaniawan</i>
453.4	<i>Mazhab Agama Khatolik</i>
453.5	<i>Organisasi Gerejani</i>
454	<i>Hindu</i>
454.1	<i>Peribadatan</i>
454.2	<i>Rumah Ibadah Pura dll</i>
454.3	<i>Tokoh Agama, Rohaniawan</i>
454.4	<i>Mazhab Agama Hindu</i>
454.5	<i>Organisasi Agama Hindu</i>
455	<i>Budha</i>
455.1	<i>Peribadatan</i>
455.2	<i>Rumah Ibadah Candi, Vihara dll</i>
455.3	<i>Tokoh Agama, Rohaniawan</i>

455.4	<i>Mazhab Agama Budha</i>
455.5	<i>Organisasi Agama Budha</i>
456	<i>Kong Hu Cu</i>
456.1	<i>Peribadatan</i>
456.2	<i>Rumah Ibadah Klenteng dll</i>
456.3	<i>Tokoh Agama, Rohaniawan</i>
456.4	<i>Mazhab Agama Kong Hu Cu</i>
456.5	<i>Organisasi Agama Kong Hu Cu</i>
460	<i>SOSIAL</i>
461	<i>Rehabilitasi Penyandang Cacat</i>
461.1	<i>Cacat Ganda</i>
461.2	<i>Cacat Fisik</i>
461.3	<i>Cacat Mental</i>
462	<i>Rehabilitasi Sosial</i>
462.1	<i>Gelandangan/Orang Terlantar, Anak Jalanan</i>
462.2	<i>Pengemis</i>
462.3	<i>Tuna Susila</i>
462.4	<i>Anak Nakal</i>
462.5	<i>Tuna Wisma</i>
463	<i>Kesejahteraan Anak dan Keluarga</i>
463.1	<i>Kesejahteraan Anak</i>
463.11	<i>Pengarusutamaan Hak-hak Anak (PUHA)</i>
463.12	<i>Perlindungan Anak</i>
463.13	<i>Anak Asuh</i>
463.2	<i>Kualitas Hidup Perempuan</i>
463.21	<i>Perlindungan Perempuan</i>
463.22	<i>Ibu Teladan</i>
463.23	<i>Pengarusutamaan Gender (PUG)</i>
464	<i>Keperintisan dan Kepahlawanan</i>
464.1	<i>Pahlawan meliputi Penghargaan Kepada Pahlawan, Tunjangan Kepada Pahlawan dan Jandanya</i>
464.2	<i>Perintis Kemerdekaan meliputi : Pembinaan, Penghargaan dan Tunjangan Kepada Perintis Kemerdekaan</i>
464.3	<i>Cacat Veteran</i>
465	<i>Kesejahteraan Sosial</i>
465.1	<i>Lanjut Usia</i>
465.2	<i>Korban Kekacauan, Pengungsian, Rehabilitasi</i>
465.3	<i>Masyarakat Miskin : Raskin, BLT dll</i>
466	<i>Sumbangan Sosial</i>
466.1	<i>Korban Bencana</i>
466.11	<i>Jaminan Sosial</i>
466.2	<i>Pencairan Dana Untuk Sumbangan : Penyelenggaraan Undian, Ketangkasan, Bazaar dsb</i>
466.3	<i>Panti Asuhan</i>
467	<i>Bimbingan sosial</i>

467.1	Masyarakat Suku Terasing meliputi : Bimbingan Pendidikan, Kesehatan, Pemukiman, Pembinaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT) dan sebagainya
468	PMI
469	Makam
469.1	Umum
469.2	Pahlawan
469.3	Khusus, Keluarga, Raja
469.4	Krematorium
470	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
470.1	Kebijakan dan Program Pemerintah Untuk Kependudukan
471	Pendaftaran Penduduk
471.1	Identitas Penduduk
471.11	Biodata
471.12	Nomor Induk Kependudukan
471.13	Kartu Tanda Penduduk
471.14	Kartu Keluarga
471.15	Advokasi Identitas Penduduk
471.2	Perpindahan Penduduk dalam Wilayah Indonesia
471.21	Perpindahan Penduduk WNI
471.22	Perpindahan Penduduk WNA dalam Wilayah Indonesia
471.23	Perpindahan Penduduk WNA dan WNI Tinggal Sementara
471.24	Daerah Terbelakang
471.25	Bedol Desa
471.3	Perpindahan Penduduk Antar Negara
471.31	Penduduk Indonesia ke Luar Negeri
471.32	Orang Asing Tinggal Sementara
471.33	Orang Asing Tinggal Tetap
471.34	Perpindahan Penduduk Antar Negara di Wilayah Perbatasan Antar Negara (Pelintas Batas Tradisional)
471.4	Pendaftaran Pengungsi dan Penduduk Rentan
471.41	Akibat Bencana Alam
471.42	Akibat Kerusuhan Sosial
471.43	Pendaftaran Penduduk Daerah Terbelakang
471.44	Pendaftaran Penduduk Rentan
472	Pencatatan Sipil
472.1	Kelahiran Kematian dan Advokasi
472.11	Kelahiran
472.12	Kematian
472.13	Advokasi
472.2	Perkawinan, Perceraian dan Advokasi
472.21	Perkawinan Agama Islam
472.22	Perkawinan Agama Non Islam
472.23	Perceraian Agama Islam
472.24	Perceraian Agama Non Islam
472.25	Advokasi

472.3	<i>Pengangkatan Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan dan Pembatalan Akta, dan Advokasi</i>
472.31	<i>Pengangkatan Anak</i>
472.32	<i>Pengakuan Anak</i>
472.33	<i>Pengesahan Anak</i>
472.34	<i>Perubahan Akta</i>
472.35	<i>Pembatalan Akta</i>
472.36	<i>Advokasi</i>
472.4	<i>Pencatatan Kewarganegaraan</i>
472.41	<i>Akibat Perkawinan</i>
472.42	<i>Akibat Kelahiran</i>
472.43	<i>Non Perkawinan/ Non Kelahiran</i>
472.44	<i>Naturalisasi</i>
472.45	<i>Perubahan WNI ke WNA</i>
473	<i>Informasi Kependudukan</i>
473.1	<i>Teknologi Informasi</i>
473.2	<i>Pengolahan Data Kependudukan</i>
473.21	<i>Pendaftaran Penduduk</i>
473.22	<i>Kejadian Vital Penduduk</i>
473.23	<i>Penduduk Non Registrasi</i>
473.3	<i>Pelayanan Informasi Kependudukan</i>
474	<i>Perkembangan Penduduk</i>
474.1	<i>Pengarahan Kuantitas Penduduk</i>
474.11	<i>Struktur Jumlah</i>
474.12	<i>Komposisi</i>
474.13	<i>Fertilitas</i>
474.14	<i>Kesehatan Reproduksi</i>
474.15	<i>Morbiditas Penduduk</i>
474.16	<i>Mortalitas Penduduk</i>
474.2	<i>Pengembangan Kuantitas Penduduk</i>
474.21	<i>Anak dan Remaja</i>
474.22	<i>Penduduk Usia Produktif</i>
474.23	<i>Penduduk Lanjut Usia</i>
474.24	<i>Gender</i>
474.3	<i>Penataan Persebaran Penduduk</i>
474.31	<i>Migrasi Antar Wilayah</i>
474.32	<i>Urbanisasi</i>
474.4	<i>Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk</i>
474.5	<i>Pengembangan Wawasan Kependudukan</i>
475	<i>TRANSMIGRASI</i>
475.1	<i>Penyiapan Informasi Daerah Transmigrasi</i>
475.11	<i>Informasi Potensi Peluang Bekerja dan Berusaha di Daerah Transmigrasi</i>
475.12	<i>Perbandingan Potensi Daerah Asal dan Daerah Transmigrasi</i>
475.13	<i>Permasyarakatan/ Sosialisasi Transmigrasi</i>
475.14	<i>Peran Serta Lembaga dan Instansi Terkait serta Media Massa Dalam Penyampaian Informasi Transmigrasi</i>

475.15	<i>Publikasi Transmigrasi melalui Pameran dan Kesenian</i>
475.16	<i>Bimbingan dan Penyuluhan Transmigrasi Bagi Masyarakat Daerah Asal dan Daerah Transmigrasi</i>
475.17	<i>Kerjasama di Bidang Transmigrasi</i>
475.18	<i>Kepulangan Transmigrasi karena Daerah Terjadi Konflik</i>
475.2	<i>Pemukiman Transmigrasi</i>
475.21	<i>Penggunaan Tanah Pemukiman Transmigrasi</i>
475.22	<i>Pengembangan, Struktur Wilayah dan Analisis Data Wilayah Transmigrasi</i>
475.23	<i>Tata Ruang Satuan Kawasan Pengembangan, Study Kelayakan dan Dampak Lingkungan Transmigrasi</i>
475.24	<i>Teknis Ruang Satuan Pemukiman dan Lokasi/Peta Informasi Pemukiman</i>
475.25	<i>Standarisasi dan Spesifikasi Teknis Rumah Transmigrasi, Fasilitas Umum/Sosial dan Jaringan Transportasi</i>
475.26	<i>Tanah Pemukiman, Pengadaan Areal Tanah dan Pembebasannya, Identifikasi, Pengukuran dan Pembuatan Batas Areal Tanah</i>
475.27	<i>Penyelesaian Masalah Tanah di Lokasi Pemukiman Transmigrasi</i>
475.28	<i>Tata Ruang Pemukiman Transmigrasi</i>
475.281	<i>Rancangan dan Pemanfaatan Areal Tanah</i>
475.282	<i>Rancangan Kapling TSM</i>
475.283	<i>Pengukuran dan Pembagian Lahan Pekarangan, Lahan Usaha dan Fasilitas Umum</i>
475.284	<i>Penyelesaian Kekurangan Lahan Usaha Kepada Transmigran dan Sengketa Tanah</i>
475.285	<i>Inventarisasi Penataan Kembali dan Penggunaan Areal Tanah</i>
475.286	<i>Pengukuran Batas Unit Pemukiman</i>
475.287	<i>Penyelesaian Perubahan Areal dan Urusan Perijinan Pemanfaatan Areal Tanah</i>
475.29	<i>Sarana Pemukiman Transmigrasi</i>
475.291	<i>Pembinaan dan Pengadiln, Penyiapan Bangunan Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga dan Fasilitas Umum</i>
475.292	<i>Pembinaan dan pengendalian penyiapan sarana air bersih</i>
475.293	<i>Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan sumber energi</i>
475.294	<i>Pembinaan dan pengendalian peningkatan sarana</i>
475.295	<i>Pembinaan , pengendalian dan teknis peningkatan potensi lahan dan lingkungan</i>
475.3	<i>Pengerahan, pemindahan dan penempatan</i>
475.31	<i>Pengkajian dan pengembangan metode pengerahan dan penempatan</i>
475.32	<i>Teknis penyuluhan dan motivasi dalam pengerahan dan penempatan</i>
475.33	<i>Pengerahan</i>
475.331	<i>Pendaftaran dan seleksi calon transmigran</i>
475.332	<i>Berkas persyaratan dan administrasi calon transmigran</i>
475.333	<i>Transmigran yang dinyatakan lulus penyaringan</i>
475.34	<i>Pemberangkatan transmigran</i>

475.341	<i>Pengangkutan transmigran melalui laut, udara, dan darat</i>
475.342	<i>Jadwal dan tempat pelaksanaan pemberangkatan</i>
475.343	<i>Pelaksanaan pengurusan pemberangkatan</i>
475.344	<i>Pengawalan perjalanan transmigran</i>
475.345	<i>Pengaturan rute pemberangkatan</i>
475.346	<i>Alokasi penempatan dan surat perintah pemberangkatan</i>
475.35	<i>Penempatan transmigran</i>
475.351	<i>Kesiapan lokasi dan daya tampung</i>
475.352	<i>Pendataan transmigran di lokasi yang masih dibina</i>
475.353	<i>Data transmigran yang meninggalkan lokasi di setiap UPT</i>
475.354	<i>Pemantauan penempatan transmigrasi pengganti</i>
475.4	<i>Penampungan transmigrasi (transito), dan pelatihan transmigran</i>
475.41	<i>Pelatihan transmigran</i>
475.411	<i>Program pengajaran dan metode pelatihan</i>
475.412	<i>Penyusunan silabus dan modul pelatihan</i>
475.413	<i>Penyusunan calon peserta/pelatih</i>
475.42	<i>Penampungan transmigran di transito</i>
475.421	<i>Pelayanan kesehatan bagi transmigran</i>
475.422	<i>Pelayanan makanan bagi transmigran</i>
475.423	<i>Pelayanan pembekalan/peralatan bagi transmigran</i>
475.5	<i>Pembinaan masyarakat transmigrasi</i>
475.51	<i>Identifikasi dan penjajagan pembinaan</i>
475.511	<i>Identifikasi, analisis data pedoman pelaksanaan rencana teknis pembinaan tahap penyesuaian</i>
475.512	<i>Identifikasi, analisis data pedoman pelaksanaan rencana teknis pembinaan tahap pengembangan</i>
475.513	<i>Identifikasi, analisis data pedoman pelaksanaan rencana teknis pembinaan tahap pembinaan</i>
475.52	<i>Pembinaan Pendidikan</i>
475.521	<i>Penyediaan/penyiapan sarana dan usaha pengembangan pendidikan</i>
475.522	<i>Pelaksanaan penyiapan tenaga pendidikan dan status</i>
475.53	<i>Pelaksanaan peningkatan partisipasi masyarakat</i>
475.54	<i>Pembinaan kesehatan</i>
475.541	<i>Penyediaan sarana kesehatan dan KB</i>
475.542	<i>Penanggulangan penyakit dan kejadian luar biasa</i>
475.543	<i>Pendistribusian bantuan pangan</i>
475.55	<i>Pembinaan rokhani</i>
475.551	<i>Bimbingan mental spiritual dan penyediaan petugas agama</i>
475.552	<i>Bimbingan adaptasi masyarakat</i>
475.553	<i>Bimbingan pelaksanaan penumbuhan interaksi sosial</i>
475.56	<i>Pelayanan pos di daerah transmigrasi</i>
475.57	<i>Penyerahan UPT yang layak untuk diserahkan</i>
475.58	<i>Penilaian transmigran teladan</i>
475.59	<i>Pemantauan dan penilaian kelayakan usaha</i>
476	KELUARGA BERENCANA

476.1	Alat Kontrasepsi
476.2	Pelayanan KB meliputi KB Lestari, KB Mandiri
476.3	Penyuluh Lapangan KB (PLKB)
476.4	Pos KB desa
476.5	Akseptor KB
480	MEDIA MASSA
480.1	Kebijakan dan program Pemerintah dalam bidang media massa
481	Media cetak meliputi perijinan hingga pencabutan ijin bila terjadi pelanggaran
481.1	Surat kabar
481.2	Majalah
481.3	Buletin
481.4	Jurnal
481.5	Press Release, Klarifikasi Berita, Press Statistik
481.51	Perindustrian Perdagangan termasuk 9 harga pokok
481.52	Perekonomian dan Perbankan
481.53	Bidang lainnya
481.6	Layanan informasi/ Leaflet
481.7	Masukan Analisis Gubernur
482	Media Elektronik meliputi perijinan hingga pencabutan ijin bila terjadi pelanggaran
482.1	Radio
482.2	Televisi
482.3	Film Dokumenter
482.4	Pengawasan Lembaga Penyiaran
482.5	Kelompok Pemantau Isi Siaran
482.6	Pengkajian Isi Siaran
482.7	SDM Penyiaran
483	Periklanan
483.1	Ketentuan Pemasangan Reklame
483.2	Pameran
484	Kewartawanan/ Jurnalistik
484.1	Pembentukan Organisasi Profesi
484.2	Kasus-kasus Kewartawanan
484.3	Penyalahgunaan Profesi
484.4	Bantuan Kepada/ dari Organisasi Profesi Wartawan
484.5	Musyawarah Wartawan Indonesia
484.6	Pendidikan Jurnalistik Khusus Wartawan
484.7	Temu Pers/ Konferensi Pers
484.8	Pers Tour
484.9	Kunjungan Wartawan Asing
485	Penyuluhan Masyarakat
485.1	Publikasi
485.2	Pendirian Information Center
486	Pembinaan Bidang Infokom
486.1	Training Fotografi

486.2	<i>Training Berita Jurnalistik</i>
486.3	<i>Bintek Infokom</i>
486.4	<i>Rakorda Infokom</i>
486.5	<i>Rakor Pengendalian Kegiatan</i>
486.6	<i>Pengelolaan Website Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat</i>
487	<i>Hubungan Antar Lembaga</i>
487.1	<i>Non Pemerintah</i>
487.11	<i>Wahana Komunikasi Masyarakat</i>
487.12	<i>Lembaga Komunikasi Masyarakat</i>
487.2	<i>Lembaga Pemerintah</i>
487.21	<i>Pertemuan Bakohumas dan Kehumasan</i>
487.22	<i>Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID)</i>
487.3	<i>Luar Negeri</i>
487.31	<i>Promosi Luar Negeri</i>
487.32	<i>Kunjungan Wartawan Asing</i>
488	<i>Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Informasi</i>
489	<i>Sistem Naskah Sosialisasi Kegiatan Gubernur</i>
489.1	<i>Himpunan Naskah Sambutan, Himpunan Paparan, Himpunan Keynote Speaker, Himpunan Rubrik dan Himpunan Dialog Interaktif</i>
489.2	<i>Dialog Interaktif</i>
489.3	<i>Rubrik</i>
489.4	<i>Materi/ Pointers Sambutan, Paparan, Naskah Keynote Speaker, Rubrik dan Dialog Interaktif</i>
489.5	<i>Pembuatan Kolom Khusus Hasil-Hasil Pembangunan</i>
500	<i>PEREKONOMIAN</i>
500.1	<i>Dewan Stabilitas</i>
501	<i>Pengadaan Pangan</i>
502	<i>Pengadaan Sandang</i>
503	<i>Perizinan pada umumnya. Untuk perizinan sesuai Bidang, Klasifikasi pada masalahnya</i>
510	<i>PERDAGANGAN</i>
510.1	<i>Promosi Perdagangan</i>
510.11	<i>Pekan Raya</i>
510.12	<i>Iklan</i>
510.13	<i>Pameran</i>
510.14	<i>Event-event</i>
510.15	<i>Lomba-lomba (lomba desain, busana, kerajinan)</i>
510.2	<i>Pelelangan, Distribusi</i>
510.21	<i>Pemasaran Sembako</i>
510.22	<i>Pemasaran Hasil Industri</i>
510.23	<i>Penentuan Harga Pokok</i>
510.3	<i>Bina usaha dan Sarana Perdagangan</i>
510.31	<i>Renana dan Program Kerja</i>
510.32	<i>Pelaksanaan Pelayanan Administrasi</i>
510.33	<i>Pelaksanaan Teknis</i>
510.34	<i>Pemantauan</i>

510.35	<i>Evalusi dan Pelaporan</i>
510.4	<i>Perijinan (HO, Gangguan, Reklame, dll)</i>
510.41	<i>Pernerbitan SIUP</i>
510.42	<i>Perpanjangan</i>
510.43	<i>Ijin Prinsip</i>
510.44	<i>Rekomendasi</i>
510.5	<i>Perdagangan Antar Pulau</i>
510.51	<i>Kerjasama Bahan Baku</i>
510.52	<i>Industri Pemasaran</i>
510.53	<i>Kontrak</i>
510.6	<i>T e r a</i>
510.61	<i>Tera dan Tera Ulang</i>
510.62	<i>Takaran</i>
510.63	<i>Timbangan dan Anak Timbangan</i>
510.64	<i>Kalibrasi</i>
510.65	<i>Cap Tanda Tera</i>
510.66	<i>Biaya Tera</i>
510.7	<i>Bantuan Peralatan</i>
510.71	<i>Proposal</i>
510.72	<i>Surat Perjanjian / Kontrak</i>
510.73	<i>Serah Terima</i>
510.8	<i>Perijinan / Rekomendasi Tanda Pabrik</i>
510.9	<i>Kemetrologian</i>
510.91	<i>Standart Tingkat Tiga</i>
510.92	<i>Standart Kerja Satuan Ukuran</i>
510.93	<i>Ukuran Metrologi</i>
510.931	<i>Peralatan</i>
510.932	<i>Laboratorium Metrologi Legal</i>
510.933	<i>Tanki Ukur Mobil</i>
510.934	<i>Meter Taxi</i>
510.935	<i>KWH Meter termasuk didalamnya Listrik dan PDAM</i>
510.936	<i>S P B U</i>
511	<i>Pemasaran</i>
511.1	<i>Sembilan Bahan Pokok diantaranya Beras, Garam, Minyak Tanah, Minyak Goreng, Sabun dll</i>
511.2	<i>Pasar</i>
511.3	<i>Pertokoan, Kaki Lima, Kios</i>
511.4	<i>Pusat Perbelanjaan</i>
512	<i>Ekspor</i>
512.1	<i>Ekspor Hasil Industri</i>
512.2	<i>Ijin Ekspor</i>
512.3	<i>Pengembangan Pasar Luar Negeri</i>
512.4	<i>Managemen Perdagangan Internasional</i>
512.5	<i>Eksport Hasil Industri</i>
512.51	<i>Kebijakan</i>
512.52	<i>Pemasaran</i>

512.6	<i>Pemberitahuan Eksport Barang</i>
512.7	<i>Pengawasan Mutu Barang</i>
512.8	<i>Eksportir Terdaftar</i>
512.9	<i>Evaluasi dan Pelaporan</i>
513	<i>Impor</i>
513.1	<i>Ijin Impor</i>
513.11	<i>Pemberian Ijin</i>
513.12	<i>Pengendalian Ijin</i>
513.2	<i>Standart Mata Dagang Import</i>
513.3	<i>Management Perdagangan Internasional</i>
513.4	<i>Kegiatan Import</i>
513.41	<i>Pembinaan Import</i>
513.42	<i>Pengendalian Import</i>
513.43	<i>Pemantauan Import</i>
513.5	<i>Faktor-faktor Pendukung</i>
513.6	<i>Pengawasan mutu Barang Import</i>
513.7	<i>Penyaluran Kegiatan Import</i>
513.71	<i>Bahan Konsumsi</i>
513.72	<i>Bahan Baku</i>
513.73	<i>Bahan Penolong</i>
513.8	<i>Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Impor</i>
514	<i>Perdagangan Antar Pulau</i>
514.1	<i>Kerjasama Bahan baku</i>
514.2	<i>Industri Pemasaran</i>
514.3	<i>Kontrak</i>
515	<i>Pengembangan Pontesi Perdagangan Luar Negeri</i>
515.1	<i>Promosi dan Informasi</i>
515.2	<i>Pameran</i>
515.3	<i>Kerjasama</i>
516	<i>Pergudangan , termasuk tangki penyimpanan minyak goreng</i>
516.1	<i>Peti kemas</i>
516.2	<i>Tangki Penyimpanan</i>
517	<i>Aneka Usaha Perdagangan</i>
518	<i>KOPERASI</i>
518.1	<i>Bina Usaha Koperasi</i>
518.11	<i>Koperasi Pertanian</i>
518.12	<i>Koperasi Non Pertanian</i>
518.13	<i>Permodalan Koperasi</i>
518.131	<i>Pemupukan Modal</i>
518.132	<i>Pemanfaatan Modal</i>
518.133	<i>Perbankan dan Asuransi</i>
518.134	<i>Permodalan Luar Koperasi</i>
518.135	<i>Kredit Program Umum</i>
518.136	<i>Kredit Program Khusus</i>
518.14	<i>Distribusi dan Jasa Koperasi</i>
518.141	<i>Distribusi Bahan Pokok</i>

518.142	<i>Distribusi Aneka Bahan</i>
518.143	<i>Distribusi Kerjasama Niaga</i>
518.144	<i>Jasa Angkutan</i>
518.145	<i>Jasa Perumahan</i>
518.146	<i>Aneka Jasa</i>
518.15	<i>Koperasi Kelistrikan, Industri dan Telekomunikasi</i>
518.2	<i>Bina Lembaga Koperasi</i>
518.21	<i>Organisasi Koperasi</i>
518.211	<i>Anggaran Dasar dan Akte Pendirian Koperasi</i>
518.212	<i>Pemberian Badan Hukum Koperasi</i>
518.213	<i>Penyelesaian Pembubaran Koperasi</i>
518.214	<i>Keragaan Koperasi</i>
518.215	<i>Pengakuan Koperasi Sekolah</i>
518.216	<i>Amalgamasi</i>
518.217	<i>Tertib Organisasi Koperasi</i>
518.218	<i>Penyelesaian Penyelisihan/ Persengketaan</i>
518.219	<i>Bimbingan Kesadaran Hukum</i>
518.22	<i>Bina Hubungan Alat Kelengkapan Organisasi Koperasi</i>
518.221	<i>Rapat Anggota Tahunan Koperasi</i>
518.222	<i>Pengurus dan Badan Pemeriksa</i>
518.223	<i>Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN)</i>
518.224	<i>Badan Penasehat dan Pertimbangan Koperasi Unit Desa (BPP KUD)</i>
518.23	<i>Bina Tata Laksana Koperasi</i>
518.231	<i>Klasifikasi Koperasi Pedesaan</i>
518.232	<i>Klasifikasi Koperasi Perkotaan</i>
518.233	<i>Klasifikasi Koperasi Sekunder</i>
518.24	<i>Administrasi Ketatalaksanaan Koperasi</i>
518.241	<i>Administrasi Koperasi Pedesaan</i>
518.242	<i>Administrasi Koperasi Perkotaan</i>
518.243	<i>Karyawan/ Maneger Koperasi</i>
518.244	<i>Sumber Daya Manusia</i>
518.245	<i>Tenaga Kerja Sukarela Terdidik (TKST)</i>
518.246	<i>Penyaluran Alat Sekolah</i>
518.247	<i>Bantuan Pemda Kepada Koperasi/ KUD</i>
518.25	<i>Akuntansi</i>
518.251	<i>Akuntansi Koperasi Pedesaan</i>
518.252	<i>Akuntansi Koperasi Perkotaan</i>
518.253	<i>Akuntansi Koperasi Sekunder</i>
518.26	<i>Pengawasan Koperasi</i>
518.261	<i>Pengawasan Koperasi Primer</i>
518.262	<i>Pengawasan Koperasi Sekunder</i>
518.263	<i>Koperasi Jasa Audit</i>
518.264	<i>Kerjasama Kantor Akuntansi</i>
518.27	<i>Penyuluhan Koperasi</i>
581.271	<i>Pembinaan Kader Koperasi</i>

518.272	Masyarakat Umum
518.273	Forum Komunikasi
518.274	Kelompok Tani
518.275	Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PKKL)
518.276	Penilaian Tingkat Nasioanl
518.3	Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
518.31	Pembinaan Usaha
518.311	Pembinaan Usaha Mikro
518.312	Pembinaan Usaha Kecil
518.313	Pembinaan Usaha Menengah
518.32	Pengawasan Usaha
518.321	Pengawasan Usaha Mikro
518.322	Pengawasan Usaha Kecil
518.323	Pengawasan Usaha Menengah
520	PERTANIAN
521	Tanaman Pangan
521.1	Rencana dan Program
521.11	Bimas/ Inmas Termasuk Kredit
521.12	Pelaporan dan Evaluasi Pertanian
521.2	Produksi
521.21	Padi
521.22	Palawija
521.23	Hortikultura (Sayuran, Buah-buahan, Tanaman Hias)
521.24	Panen Gagal (Puso)
521.3	Sarana Usaha Pertanian
521.31	Peralatan
521.32	Meliputi Traktor dan sebagainya
521.33	Pembenihan dan Pembibitan
521.34	Pupuk
521.35	Irigasi Pertanian
521.36	Rehabilitasi Lahan Pertanian
521.4	Perlindungan Tanaman
521.41	Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Pangan
521.411	Penyakit Tanaman Pangan
521.412	Hama Tanaman Pangan
521.42	Pemberantas
521.421	Pestisida
521.422	Agensia Pengendalian Hayati
521.43	Tanah Pertanian Pangan
521.431	Persawahan
521.432	Perladangan
521.433	Kebun
521.5	Pengusaha, Petani
521.6	Lahan Kritis
521.7	Pemasaran dan Promosi Pertanian
521.8	Pengembangan Sumber Daya Pertanian

522	KEHUTANAN
522.1	Perencanaan Hutan
522.11	Survey
522.111	Survey PPA
522.112	Survey Areal
522.113	Survey Pembinaan Hutan
522.114	Survey Potensi Hutan
522.12	Pendataan/ Inventarisasi Areal Hutan
522.121	Data Areal Tata Guna Hutan
522.122	Data Areal Konservasi
522.2	Tata Guna Hutan
522.21	Tata Ruang Kawasan
522.211	Pengurusan Kawasan Hutan
522.212	Penafsiran Hutan
522.213	Mutasi Hutan
522.22	Tata Hutan
522.221	Tata Hutan Sementara
522.222	Tata Hutan Tetap
522.223	Pembukaan Hutan
522.23	Pengukuran dan Pemetaan
522.3	Pengusahaan Hutan
522.31	Data Areal HPH
522.311	SK HPH
522.312	Kerja Sama
522.313	Pembatalan/ Penolakan
522.32	Modal dan Peralatan
522.321	Inventarisasi Logging
522.322	Inventarisasi Industri
522.323	Peralatan
522.324	Tenaga Kerja Pengusahaan Hutan
522.325	Pemegang Saham
522.32.6	Neraca Perusahaan
522.33	Rencana Kerja
522.331	KHPH
522.332	RKPH
522.34	Perpanjangan HPH
522.35	Produksi
522.351	Target Produksi
522.352	Produksi Kayu
522.353	Industri Non- Kayu
522.36	Industri
522.361	Industri Kayu HPH
522.362	Industri Kayu Non-HPH
522.363	Industri Non Kayu
522.37	Pembinaan HPH
522.371	Pelanggaran dan Sanksi

522.38	<i>Pembangunan Hutan Tanaman Industri</i>
522.381	<i>Hutan Tanaman Industri Pulp</i>
522.382	<i>HTI Pertukaran</i>
522.39	<i>Iuran Hutan</i>
522.4	<i>Sarana Usaha</i>
522.41	<i>Standarisasi</i>
522.411	<i>Kayu</i>
522.412	<i>Non Kayu</i>
522.42	<i>Pengujian Hasil Hutan</i>
522.43	<i>Pengembangan</i>
522.431	<i>Pengembangan Perusahaan</i>
522.432	<i>Pengembangan Pemasaran</i>
522.44	<i>Pemasaran Hasil Hutan</i>
522.45	<i>SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan), Angkutan Hasil Hutan</i>
522.451	<i>Sarana dan Prasarana</i>
522.452	<i>Pembinaan dan Peningkatan Daya Hutan</i>
522.46	<i>Tata Usaha Hasil Hutan</i>
522.47	<i>PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat)</i>
522.5	<i>Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam</i>
522.51	<i>Konservasi Jenis</i>
522.511	<i>Satwa yang Dilindungi</i>
522.512	<i>Satwa yang Tidak Dilindungi</i>
522.513	<i>Lembaga Konservasi Satwa</i>
522.514	<i>Lembaga Konservasi Tumbuhan</i>
522.52	<i>Kawasan Konservasi</i>
522.521	<i>Cagar Alam (termasuk laut)</i>
522.522	<i>Suaka Margasatwa</i>
522.523	<i>Taman Wisata (termasuk laut)</i>
522.524	<i>Taman Nasional</i>
522.525	<i>Taman Hutan Raya / Kebun Raya</i>
522.526	<i>Taman Baru</i>
522.527	<i>Hutan Lindung</i>
522.53	<i>Pengkajian Lingkungan</i>
522.531	<i>Amdal UKL, UPL, Di Dalam Kawasan</i>
522.532	<i>Amdal UKL, UPL, Di Luar Kawasan</i>
522.54	<i>Bina Cinta Alam</i>
522.541	<i>Kelompok Pecinta Alam</i>
522.542	<i>Kader Konservasi Sumber Daya Alam</i>
522.543	<i>Penyuluhan Konservasi Sumber Daya Alam</i>
522.544	<i>LSM Lingkungan</i>
522.55	<i>Pengamanan Hutan</i>
522.551	<i>Jaga Wana</i>
522.552	<i>PPNS</i>
522.553	<i>Gangguan Keamanan Hutan</i>
522.554	<i>Bencana Alam</i>

522.555	<i>Kebakaran Hutan</i>
522.556	<i>Sengketa Hutan</i>
522.557	<i>Hama dan Penyakit</i>
522.558	<i>Pestisida dan Pupuk Tanaman Hutan</i>
522.559	<i>Alat dan Mesin Kehutanan</i>
522.6	<i>Reboisasi dan Rehabilitasi Hutan</i>
522.61	<i>Pembenihan</i>
522.611	<i>Tegakan Benih</i>
522.612	<i>Pengadaan Benih</i>
522.613	<i>Pengujian dan Penyimpanan Benih</i>
522.614	<i>Lalu Lintas Angkutan Benih</i>
522.615	<i>Pembibitan</i>
522.616	<i>Pengada dan Pengedar Bibit Bersertifikat</i>
522.617	<i>Pengada dan Pengedar Bibit Tidak Bersertifikat</i>
522.62	<i>Tanaman Reboisasi</i>
522.621	<i>Lahan Kritis</i>
522.622	<i>Reboisasi Lahan HPH</i>
522.623	<i>Rehabilitasi Tanah Hutan</i>
522.624	<i>Konservasi Tanah dan Air</i>
522.625	<i>Pengendalian Perladangan</i>
522.626	<i>Penghijauan</i>
522.627	<i>Aneka Usaha Kehutanan</i>
522.63	<i>Perhutanan Sosial</i>
522.631	<i>Sutera Alam</i>
522.632	<i>Minyak Kayu Putih</i>
522.633	<i>Perlebahan</i>
522.7	<i>Hutan Produksi</i>
522.71	<i>Hutan Produksi Terbatas</i>
522.72	<i>Hutan Produksi yang Dapat Dikonservasi</i>
522.8	<i>Kawasan Lindung</i>
523	<i>PERIKANAN DAN KELAUTAN</i>
523.1	<i>Rencana, Program, Stastistik, Prospek dan Pelaporan Bidang Perikanan dan Kelautan</i>
523.11	<i>Penyuluhan</i>
523.12	<i>Teknologi</i>
523.2	<i>Produksi Perikanan</i>
523.21	<i>Standarisasi Mutu Hasil Perikanan</i>
523.22	<i>Perikanan Budidaya : CBIB, CBIC</i>
523.23	<i>Sertifikasi Kesehatan Ikan</i>
523.3	<i>Usaha Perikanan</i>
523.31	<i>Pelatihan Nelayan</i>
523.32	<i>Pembinaan Wanita Nelayan</i>
523.33	<i>Fasilitas Perijinan : SIUP, SIPI, SKP</i>
523.34	<i>Perbenihan</i>
523.4	<i>Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan</i>
523.41	<i>Ekspor Hasil Perikanan</i>

523.42	<i>Impor Hasil Perikanan</i>
523.43	<i>Pemasaran Dalam Negeri</i>
523.44	<i>Pengusaha Perikanan</i>
523.5	<i>Sarana Perikanan</i>
523.51	<i>Pelabuhan Perikanan Pantai</i>
523.52	<i>TPI/ PPI</i>
523.53	<i>Kesyahbandaran</i>
523.54	<i>Peralatan Penangkapan : kapal, perahu, jaring, pump dsb</i>
523.6	<i>Pengendalian Hama dan Penyakit</i>
523.61	<i>Penyakit Ikan</i>
523.62	<i>Hama Ikan</i>
523.63	<i>Obat-obatan termasuk Sertifikasinya</i>
523.7	<i>Konservasi dan Suaka Laut</i>
523.71	<i>Transplantasi Bibit Karang</i>
523.72	<i>Terumbu Karang</i>
523.73	<i>Mangrove</i>
523.74	<i>Garam</i>
523.75	<i>Harta Karun di Dalam Laut</i>
523.76	<i>Pembinaan/ Pendidikan Masyarakat Pesisir</i>
524	PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
524.1	<i>Produksi</i>
524.11	<i>Perbibitan</i>
524.12	<i>Penyebaran dan Pengembangan Peternakan</i>
524.13	<i>Budidaya</i>
524.2	<i>Usaha Peternakan</i>
524.21	<i>Pelayanan Usaha</i>
524.22	<i>Pengolahan Hasil dan Pemasaran</i>
524.23	<i>Pengembangan SDM dan Kelembagaan Peternakan</i>
524.3	<i>Kesehatan Hewan</i>
524.31	<i>Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan</i>
524.32	<i>Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan</i>
524.33	<i>Obat-obatan Hewan</i>
524.34	<i>Pelayanan Kesehatan Hewan</i>
524.4	<i>Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan</i>
524.41	<i>Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan</i>
524.42	<i>Hygieni dan Sanitasi</i>
524.43	<i>Produk Hewani</i>
524.5	<i>Laboratorium Kesehatan Hewan</i>
524.51	<i>Pengujian Mutu Asal Hewan</i>
524.52	<i>Pengujian Mutu Produk Bahan Asal Hewan</i>
524.6	<i>Inseminasi Buatan</i>
524.61	<i>Produksi Distribusi dan Pemasaran</i>
524.62	<i>Pemeliharaan Ternak dan Pelayanan Reproduksi</i>
524.7	<i>Pembibitan dan Budi Daya Ternak</i>
524.71	<i>Ternak Non Ruminansia</i>
524.72	<i>Ternak Ruminansia</i>

525	PERKEBUNAN
525.1	Program dan Pelaporan
525.11	Pelaporan
525.12	Monitoring
525.13	Statistik Perkebunan
525.2	Produksi
525.21	Karet
525.22	T e h
525.23	Tembakau
525.24	Tebu
525.25	Cengkeh
525.26	Kelapa/Kopra/Kelapa Sawit
525.27	Kopi
525.28	Kakao
525.29	Jenis Tanaman Yang Lain
525.3	Usaha Perkebunan
525.31	Benih
525.32	Pembibitan
525.33	Kelompok Tani
525.34	Kemitraan
525.35	Rekomendasi Ijin Usaha Perkebunan
525.36	Pemasaran Hasil Perkebunan
525.4	Perlindungan Tanaman
525.41	Hama
525.42	Pestisida
525.43	Agensi Pengendalian Hayati
525.5	Alat dan Mesin Perkebunan
525.51	Power Sprayer
525.52	Hand Sprayer
525.53	Polibag
525.54	Alat Laboratorium Perkebunan
525.55	Reagen
525.56	Sarana/ Alat Produksi Perkebunan
525.6	Pengolahan Lahan
525.61	Terasering
525.7	Pemasyarakatan
525.71	Penyuluhan
525.72	Sosialisasi
525.73	Informasi
526	KETAHANAN PANGAN
526.1	Program Bimbingan Massal
526.2	Pengembangan Sarana Sumber Daya
526.21	Pembinaan Teknologi
526.22	Sarana Produksi dan Permodalan
526.23	Kelembagaan
526.	Agribisnis

526.3	<i>Mutu Hasil</i>
526.31	<i>Pengelola Hasil Pangan</i>
526.32	<i>Pemasaran Hasil</i>
526.33	<i>Kementriaan</i>
526.4	<i>Distribusi Pangan</i>
526.41	<i>Sistem dan Pola Distribusi</i>
526.42	<i>Sarana dan Prasarana Distribusi</i>
526.43	<i>Pengadaan dan Cadangan Pangan</i>
526.5	<i>Kewaspadaan dan Keanekaragaman Pangan</i>
526.51	<i>Rawan Pangan, Keamanan dan Mutu Pangan</i>
526.52	<i>Pola Konsumsi Pangan Masyarakat</i>
526.53	<i>Sistem Informasi Pangan</i>
527	<i>PENYULUHAN</i>
527.1	<i>Sumber Daya Manusia</i>
527.11	<i>Penyuluh</i>
527.12	<i>Pelaku Utama Pelaku Usaha</i>
527.13	<i>Stake Holder</i>
527.2	<i>Kelembagaan</i>
527.21	<i>Struktural</i>
527.22	<i>Non Struktural</i>
527.23	<i>Pelaku Utama Pelaku Usaha</i>
527.24	<i>Lembaga Profesi</i>
527.3	<i>Penyelenggaraan Penyuluhan</i>
527.31	<i>Program/ Metode</i>
527.32	<i>Promosi/ Pameran/ Kampanye</i>
527.33	<i>Penghargaan/ Lomba</i>
527.34	<i>Materi</i>
530	<i>PERINDUSTRIAN</i>
530.1	<i>Undang-undang Gangguan</i>
531	<i>Industri Logam</i>
532	<i>Industri Mesin/ Elektronik</i>
533	<i>Industri Kimia/ Farmasi</i>
534	<i>Industri Tekstil</i>
535	<i>Industri Makanan/ Minuman</i>
536	<i>Aneka Industri/ Perusahaan</i>
536.1	<i>Home Industri</i>
537	<i>Aneka Kerajinan</i>
537.1	<i>Kerajinan Rakyat</i>
538	<i>Usaha Negara</i>
538.1	<i>Perjan</i>
538.2	<i>Perum</i>
538.3	<i>Persero</i>
539	<i>Perusahaan Daerah</i>
540	<i>ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</i>
541	<i>Minyak dan Gas Bumi</i>
541.1	<i>Pengusahaan</i>

541.11	Perijinan
541.12	Rekomendasi
541.13	Kontrak Karya
541.14	Pengolahan
541.2	Penyaluran
541.3	Tangki, Pompa, Tanker
542	Energi
542.1	Energi Alternatif
542.11	Gas Rawa
542.12	Bahan Bakar Nabati (Biofuel)
542.13	Biogas
542.14	Energi Baru Terbarukan
542.15	Perijinan
542.16	Rekomendasi
542.17	Pembinaan dan Pengawasan
542.2	Konservasi Energi
542.3	Pemetaan Energi
542.4	Rencana Umum Perencanaan Energi Daerah (RUPED)
543	Pertambangan, Mineral dan Batubara
543.1	Wilayah Usaha Pertambangan (WIUP)
543.11	WIUP Batuan
543.12	WIUP Bukan Logam
543.13	WIUP Logam
543.14	WIUP Batubara
543.2	Rekomendasi Teknis
543.3	Perijinan
543.31	IUP Eksplorasi
543.32	IUP Operasi Produksi
543.33	IUP Operasi Produksi Khusus
543.34	Ijin Usaha Jasa Pertambangan
543.35	Pencabutan Ijin
543.4	Pembinaan
543.5	Pengawasan
543.51	Pengawasan Usaha Pertambangan
543.52	Penerbitan Kegiatan Pertambangan
543.6	Pasca Tambang
543.61	Reklamasi
543.62	Penutupan
544	Air tanah
544.1	Cekungan Air Tanah (CAT)
544.11	Pemetaan CAT
544.12	Imbuhan CAT
544.13	Lepasan CAT
544.14	Konservasi
544.15	Pengendalian Daya Rusak
544.2	Rekomendasi Teknis

544.3	Sumur Artesis
544.4	Sumur Bor
544.5	Sumur Gali (Pasak)
544.6	Pengusaha Pengebor (APATINDO)
544.7	Sumur Pantau
544.8	Harga Dasar Air/ Nilai Perolehan Air
544.9	Hidrologi
545	Geologi
545.1	Pemetaan
545.2	Mitigasi Bencana Geologi
545.3	Vulkanologi
545.31	Pengawasan Vulkanologi
545.32	Panas Bumi
545.4	Hidrogeologi
545.5	Gerakan Tanah (Longsor, amblesan)
545.6	Pengawasan, Pengendalian
546	Hidrologi
547	Kesamudraan
548	Penghematan Energi
550	PERHUBUNGAN
551	Perhubungan Darat
551.1	Lalu Lintas Jalan Raya, Sungai, Danau
551.11	Keamanan Lalu Lintas, Rambu-rambu
551.12	Uji Kelayakan Kendaraan Bermotor (Keur)
551.13	Kecelakaan Lalu Lintas
551.2	Angkutan Jalan Raya
551.21	Perizinan
551.22	Terminal
551.23	Alat Angkutan
551.24	Jembatan Timbang/ Lebih Muatan
551.25	Uji Mutu
551.3	Angkutan Sungai
551.31	Keselamatan, Rambu-rambu
551.32	Lalu Lintas
551.33	Alur dan Kolam Pelabuhan
551.34	Trayek
551.35	Sarana/Kapal
551.36	Pelabuhan
551.37	Terminal
551.38	Kecelakaan
551.39	Perizinan
551.4	Angkutan Danau
551.41	Keselamatan, Rambu-rambu
551.42	Lalu Lintas
551.43	Alur dan Kolam Pelabuhan
551.44	Trayek

551.45	<i>Sarana/Kapal</i>
551.46	<i>Pelabuhan</i>
551.47	<i>Terminal</i>
551.48	<i>Kecelakaan</i>
551.49	<i>Perizinan</i>
551.5	<i>Perkereta-Apian</i>
551.51	<i>Sarana meliputi Lokomotif, Gerbong, Bogie</i>
551.52	<i>Prasarana (Jalan/Jembatan)</i>
551.53	<i>Trayek</i>
551.54	<i>Angkutan Penumpang</i>
551.55	<i>Angkutan Barang</i>
551.56	<i>Keselamatan</i>
551.57	<i>Kecelakaan</i>
551.58	<i>Perawatan/Perbaikan</i>
551.59	<i>Perizinan</i>
552	<i>Perhubungan Laut</i>
552.1	<i>Lalu Lintas Angkutan Laut</i>
552.11	<i>Pelayaran Dalam Negeri</i>
552.12	<i>Pelayaran Luar Negeri</i>
552.13	<i>Pelayaran Haji</i>
552.14	<i>Pelayaran Charter/ Wisata Turis</i>
552.15	<i>Pelayaran Khusus</i>
552.16	<i>Keamanan Lalu Lintas, Rambu-rambu</i>
552.2	<i>Perkapalan-Alat Angkutan</i>
552.21	<i>Kapal Penumpang</i>
552.22	<i>Kapal Barang</i>
552.23	<i>Kapal Perang/Patroli/Negara</i>
552.24	<i>Kapal Tanker</i>
552.25	<i>Ponton/Tongkang</i>
552.26	<i>Kapal Layar</i>
552.27	<i>Kapal Layar Motor</i>
552.28	<i>Kapal Kontainer</i>
552.3	<i>Pelabuhan</i>
552.31	<i>Tanah/Lokasi</i>
552.32	<i>Alur Layar</i>
552.33	<i>Dermaga</i>
552.34	<i>Terminal Penumpang</i>
552.35	<i>Terminal Kontainer</i>
552.36	<i>Bangunan/Gedung/Gudang</i>
552.37	<i>Perlengkapan Tambat Labuh</i>
552.38	<i>Lapangan Penumpukan</i>
552.39	<i>Pelabuhan Khusus/Dermaga Khusus</i>
552.4	<i>Pengerukan/Perawatan</i>
552.41	<i>Alur Pelayaran</i>
552.42	<i>Kolam Pelabuhan</i>
552.43	<i>Reklamasi Pantai</i>

552.44	Dumping Area
552.45	Pekerjaan Bawah Air (Salvage)
552.5	Penjagaan Pantai
552.51	Patroli Bandar
552.52	Patroli Perairan
552.53	Penjagaan Pantai dan Penanggulangan Keselamatan di Laut (GAMAT)
552.6	Angkutan Barang
552.61	P O S
552.62	Minyak
552.63	L o g
552.64	Ternak
552.65	Sembilan Bahan Pokok
552.66	Peti Kemas / EMKL
552.67	Muatan Umum
552.68	Barang Dalam Negeri, Barang Luar Negeri
552.69	Bongkar Muatan
552.7	Keselamatan
552.71	Rambu-rambu/ Mercu suar
552.72	Kelaikan Kapal/ Pembangunan Kapal
552.73	Fasilitas Keselamatan/Keamanan
552.74	Telekomunikasi Pelayaran
552.75	Sertifikasi Kesempurnaan Kapal
552.76	Sertifikasi Awak Kapal
552.8	Kecelakaan, Gangguan
552.81	Kecelakaan Penumpang/ Kapal
552.82	Kecelakaan Barang
552.83	Gangguan Sarana/ Prasarana
552.84	Pembajakan/ Penyeludupan
552.85	Pencemaran
552.9	Perijinan
552.91	Ijin Berlayar
552.92	Ijin Pekerjaan Bawah Air
552.93	Ijin Pembuatan dan Perubahan Bentuk Kapal
552.94	Ijin Pembukaan Kantor Cabang
552.95	Ijin Usaha Angkutan Laut
552.96	Ijin Usaha Penunjang Angkutan Laut
552.97	Ijin Pelayanan Jasa Kepelabuhan
552.98	Ijin Pembangunan Pelabuhan Khusus
552.99	Ijin Pembangunan Dermaga Khusus
553	Perhubungan Udara
553.1	Lalu Lintas Angkutan Udara
553.11	Penerbangan Domestik
553.12	Penerbangan Luar Negeri
553.13	Penerbangan Haji
553.14	Penerbangan Charter/ Non Regular

553.15	<i>Penerbangan Khusus/Jembatan Udara</i>
553.2	<i>Pelabuhan Udara</i>
553.21	<i>Tanah/Lokasi</i>
553.22	<i>Landasan</i>
553.23	<i>Apron</i>
553.24	<i>Terminal Penumpang</i>
553.25	<i>Terminal Cargo</i>
553.26	<i>Bangunan/Gedung</i>
553.27	<i>Perlengkapan</i>
553.28	<i>Parkir Kendaraan</i>
553.3	<i>Alat Angkutan</i>
553.31	<i>Pesawat Udara</i>
553.32	<i>Helikopter</i>
553.4	<i>Angkutan Barang</i>
553.41	<i>P o s</i>
553.42	<i>Muatan Dalam Negeri</i>
553.43	<i>Muatan Luar Negeri</i>
553.44	<i>EMPU</i>
553.5	<i>Sertifikasi Kelaikan</i>
553.51	<i>Kelaikan Pesawat Udara</i>
553.52	<i>Kelaikan Peralatan Penunjang</i>
553.53	<i>Kelaikan Personil/Awak Kapal</i>
553.6	<i>Keselamatan</i>
553.61	<i>Rambu-rambu</i>
553.62	<i>Perakitan/Kalibrasi</i>
553.63	<i>Fasilitas Keselamatan</i>
553.64	<i>Telekomunikasi Penerbangan</i>
553.7	<i>Kecelakaan/Gangguan</i>
553.71	<i>Kecelakaan Penumpang</i>
553.72	<i>Kecelakaan Barang</i>
553.73	<i>Gangguan Sarana/Prasarana</i>
553.74	<i>Pembajakan</i>
553.75	<i>Pencemaran</i>
553.8	<i>Umum</i>
553.81	<i>Asuransi</i>
553.82	<i>Asosiasi</i>
553.83	<i>SATPAM</i>
553.84	<i>Rally Udara/Lomba</i>
553.9	<i>Perizinan</i>
553.91	<i>Izin Terbang/ Flight Approval</i>
553.92	<i>Usaha Kegiatan Penunjang Penerbangan / EMPU</i>
553.93	<i>Pembukaan Kantor Cabang</i>
553.94	<i>Rekomendasi Ketinggian Bangunan</i>
553.95	<i>Pembangunan Bandar Udara Khusus</i>
554	<i>POS</i>
554.1	<i>Pembinaan</i>

554.11	<i>Kebutuhan Fasilitas</i>
554.12	<i>Rehabilitasi/Perawatan</i>
554.13	<i>Bina Usaha/Pengawasan/Penerbitan</i>
554.14	<i>Standarisasi Perangkat</i>
554.15	<i>Tanah/Bangunan</i>
554.16	<i>Filateli</i>
554.17	<i>Asosiasi</i>
554.18	<i>Laporan, dan Evaluasi</i>
554.2	<i>Pelayanan</i>
554.21	<i>Jasa Pos</i>
554.22	<i>Jasa Titipan</i>
554.23	<i>Jasa Giro</i>
554.24	<i>Benda pos/Perangko</i>
554.25	<i>Sampul Peringatan</i>
554.26	<i>Jasa pos Elektronik</i>
554.3	<i>Perijinan</i>
554.31	<i>Rekomondasi Usaha Jasa Pos/Titipan</i>
554.32	<i>Pembukaan Agen/Cabang</i>
554.4	<i>Gangguan Sarana dan Prasarana</i>
554.41	<i>Kecelakaan</i>
554.42	<i>Sabotase</i>
554.43	<i>Penyeludupan</i>
555	<i>Teknologi Informasi</i>
555.1	<i>Kebijakan</i>
555.2	<i>Peralatan</i>
555.21	<i>Telepon</i>
555.22	<i>Internet/USO</i>
555.23	<i>Telegram, Telex/SBB, Faximile</i>
555.24	<i>Satelit, Stasiun Bumi</i>
555.25	<i>Radio Kumunikasi</i>
555.3	<i>Sistem</i>
555.4	<i>Pembinaan / Penertiban</i>
555.5	<i>Perijinan</i>
556	<i>Pariwisata dan Rekreasi</i>
556.1	<i>Usaha Pariwisata</i>
556.11	<i>Usaha Jasa Pariwisata</i>
556.111	<i>Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata</i>
556.112	<i>Restoran dan Rumah Makan</i>
556.12	<i>Ijin Usaha Obyek dan Atraksi Wisata</i>
556.13	<i>Pengusaha Obyek dan Daya Tarik Wisata</i>
556.14	<i>Usaha Sarana Pariwisata</i>
556.141	<i>Ijin Pariwisata</i>
556.142	<i>Ijin Usaha Pariwisata</i>
556.143	<i>Ijin Usaha Jasa Pariwisata</i>
556.144	<i>Ijin Pengusaha Objek dan Daya Tarik Wisata</i>
556.145	<i>Ijin Usaha Sarana</i>

556.15	Wisatawan
556.151	Wisatawan Nusantara
556.152	Wisatawan Mancanegara
556.16	Promosi dan Informasi Pariwisata
556.161	Dalam Negeri
556.162	Luar Negeri
556.2	Perhotelan
556.21	Status Hotel
556.22	Kelas Hotel
556.23	Tarif
556.3	Travel Service
556.31	Pramu Wisata
556.32	Biro Perjalanan / Angkutan Wisata
556.33	Souvenir
556.34	Kemudahan Wisata (Visa, Bea Cukai, Karantina)
556.4	Tempat Rekreasi
556.41	Obyek dan Daya Tarik Wisata
556.411	Ciptaan Tuhan
556.412	Hasil Karya Manusia
556.42	Rehabilitasi / Perawatan
556.43	Pengembangan Fasilitas
556.44	Tanah / Bangunan
556.45	Bina Usaha
556.46	Institusi
556.461	Asosiasi
556.462	Lembaga Kepariwisata
557	Metereologi
557.1	Curah Hujan
557.2	Hujan Buatan
557.3	Peneropongan Bintang
560	TENAGA KERJA
560.1	Data Permintaan TKI / TKW Dari Luar Negeri
560.11	Data Persediaan TKI / TKW Dari Daerah
560.2	Job Order TKI / TKW
560.3	Rekrutmen Calon TKI / TKW
560.4	Seleksi Naker ke Luar Negeri
560.41	Pendaftaran dan Seleksi Calon TKI / TKW
560.42	Berkas Persyaratan Calon TKI / TKW
560.43	Pemeriksaan dan Hasil Cek Kesehatan TKI / TKW
560.5	Persyaratan Naker TKI / TKW
560.51	Permohonan Rekomendasi Passport
560.52	Perjanjian Kerja TKI/TKW
560.53	Kartu Identitas Tenaga Kerja Indonesia (KITKI)
560.54	Permohonan Fiskal ke Luar Negeri
560.55	Pelatihan TKI/TKW
560.6	Pemberangkatan Naker

560.61	<i>Pemberangkatan ke Luar Negeri</i>
560.62	<i>Pembekalan Akhir Pemberangkatan TKI/TKW ke Luar Negeri</i>
560.63	<i>Berita Acara Serah Terima TKI/TKW</i>
560.7	<i>Pemulangan Naker</i>
560.71	<i>Kepulangan TKI/TKW karena Kontraknya Habis</i>
560.72	<i>Pemulangan TKI/TKW Ilegal</i>
560.73	<i>TKI/TKW Terkena Kasus Pidana</i>
561	<i>Upah</i>
561.1	<i>Kegiatan dan Hasil Sidang Dewan Penelitian Pengupahan Daerah/ Nasional</i>
561.2	<i>Pemohonan Penangguhan Pelaksanaan Pembayaran Upah Minimum Kabupaten/ Kota dan Provinsi</i>
561.3	<i>Kebutuhan Fisik Minuman</i>
561.4	<i>Perhitungan Upah Kerja (termasuk didalamnya upah lembur)</i>
561.5	<i>Laporan Data Remittance</i>
561.6	<i>Pembayaran Gaji/Upah TKI/TKW</i>
562	<i>Penempatan</i>
562.1	<i>Penempatan Naker Penempatan Naker Mandiri Terdidik (TKMT)</i>
562.11	<i>Penempatan Naker Mandiri Profesional (TKMP)</i>
562.12	<i>Penempatan Naker Non Terdidik dan Non Profesional</i>
562.13	<i>Pengembangan Kesempatan Berusaha/ Peluasan Kerja</i>
562.2	<i>Kesepakatan Kerja Bersama</i>
562.3	<i>Lembaga Penyalur Naker</i>
562.31	<i>Ijin Pendirian Lembaga Penyaluran Naker Antar Kerja Lokal/ Daerah Dan Antar Kerja Negara (AKAN)</i>
562.32	<i>Data Evaluasi Kinerja Penyalur Jasa Tenaga Kerja (PJTKI/ BKS/ BKK)</i>
562.33	<i>Pencabutan Ijin Penyalur Jasa Tenaga Kerja (PJTKI, BKK, BKS)</i>
563	<i>Latihan Kerja</i>
563.1	<i>Pendidikan Pekerja</i>
563.11	<i>Pendidikan dan Latihan Kerja</i>
563.12	<i>Diklat di Dalam Negeri (PKL, Prakerin, OJT)</i>
563.13	<i>Diklat di Luar Negeri (Pemagangan)</i>
563.2	<i>Sarana dan Prasarana Latihan Kerja</i>
563.21	<i>Tempat Pelatihan (BLK)</i>
563.22	<i>Instruktur/ Pelatihan</i>
563.23	<i>Modul/ Silabus dan Bahan Praktek</i>
563.24	<i>Kurikulum dan Metode Pengajaran</i>
563.25	<i>Sertifikat</i>
563.3	<i>Kerjasama Pelatihan Tenaga Kerja</i>
564	<i>Tenaga Sukarela</i>
564.1	<i>Butsi</i>
564.2	<i>Padat Karya</i>
565	<i>Perselisihan Pekerja</i>
565.1	<i>Perselisihan dan Perkara Hukum Naker</i>
565.11	<i>Pengaduan Perkara Pekerja / NAKER</i>
565.12	<i>Pemeriksaan Perkara Pekerja / NAKER</i>

565.13	<i>Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pekerja / NAKER</i>
565.14	<i>Sidang Perkara Perselisihan Pekerja / NAKER</i>
565.15	<i>Hasil Putusan Sidang Perkara Perselisihan Pekerja (NAKER)</i>
565.16	<i>Peninjauan Kembali Hasil Putusan Sidang KP2K (PAD/ P4P)</i>
565.17	<i>Permintaan Eksekusi Terhadap hasil Keputusan KP2K (PAD/ P4P)</i>
565.18	<i>Daftar Usulan, Susunan dan Penetapan Anggota KP2K (PAD/ P4P)</i>
565.2	<i>Pemogokan/Unjuk Rasa Tenaga Kerja</i>
566	<i>Keselamatan Kerja</i>
566.1	<i>Instalasi Proteksi Kebakaran</i>
566.2	<i>Pemakaian Alat Keselamatan Kerja</i>
566.3	<i>Keterangan Kelayakan atau Pelindung Diri (APD) dalam bekerja</i>
566.4	<i>Pengangkatan dan Pembinaan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</i>
566.5	<i>Pelatihan/ Pembinaan Hyperkes dan Keselamatan Kerja</i>
566.6	<i>Pengujian dan Hasil Pemeriksaan Hyperkes</i>
566.7	<i>Gangguan Lingkungan Tempat Usaha</i>
566.8	<i>Perlengkapan Sarana Kerja</i>
566.81	<i>Pemasangan dan Pemakaian Lift (pesawat angkat/ angkut)</i>
566.82	<i>Pemasangan dan Pemakaian Uap (ketel uap)</i>
566.83	<i>Pemasangan dan Pemakaian Motor Diesel</i>
566.84	<i>Pemasangan dan Pemakaian Tangki Tak Bertekanan</i>
566.85	<i>Pemasangan dan Pemakaian Alat Pemadam Kebakaran</i>
566.9	<i>Ijin Tenaga Kerja Wanita Masuk Malam Hari (shifht malam)</i>
567	<i>Pemutusan Hubungan Kerja</i>
567.1	<i>Pengaduan PHK Sepihak</i>
567.2	<i>PHK Massal</i>
567.3	<i>Bantuan Hukum Bagi Pekerja Yang di PHK</i>
567.4	<i>Ijin Melakukan PHK</i>
567.5	<i>Perhitungan Masa Kerja Bagi Pekerja Yang di PHK</i>
567.6	<i>Pemberian Uang Tunggu Bagi Pekerja Yang di PHK</i>
567.7	<i>Pemberian Uang Pesangon Bagi Pekerja Yang di PHK</i>
568	<i>Kesejahteraan Pekerja</i>
568.1	<i>Bantuan Kredit/ Bantuan Modal Kerja Bagi Naker</i>
568.11	<i>Pemilihan Pekerja Teladan</i>
568.2	<i>Perumahan Pekerja</i>
568.3	<i>Keikutsertaan Pekerja Dalam Program Jamsostek</i>
568.4	<i>Koperasi Pekerja</i>
568.5	<i>Sarana Transportasi Pekerja</i>
568.6	<i>Perpustakaan Pekerja</i>
568.7	<i>Tempat Ibadah Pekerja</i>
568.8	<i>Rekreasi dan Olah Raga Pekerja</i>
568.9	<i>Pendirian, Pendaftaran, dan Kegiatan Organisasi Pekerjaan</i>
568.91	<i>Lembaga Kerjasama Bipartid</i>
569	<i>Tenaga Kerja Orang Asing</i>
569.1	<i>Rekomendasi Perpanjangan Ijin Kerja Tenaga Asing (IKTA)</i>

569.2	<i>Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)</i>
569.3	<i>Kualifikasi Keahlian Tenaga Kerja Asing</i>
569.4	<i>Perjanjian Kerja Dengan Tenaga Asing</i>
569.5	<i>Data Tenaga Kerja Asing</i>
569.6	<i>Kecelakaan/ Kematian Tenaga Kerja Asing</i>
569.7	<i>Pemulangan Tenaga Kerja Asing</i>
569.8	<i>Pemberdayaan dan Kontribusi Tenaga Kerja Asing</i>
569.9	<i>Tenaga Kerja Asing Ilegal</i>
570	<i>PENANAMAN MODAL</i>
570.1	<i>Penanaman Modal Dalam Negeri</i>
570.2	<i>Penanaman Modal Asing</i>
571	<i>Modal Patungan (joint venture/ penyertaan modal)</i>
572	<i>Pasar Uang dan Modal</i>
573	<i>Saham</i>
580	<i>PERBANKAN MONETER</i>
581	<i>Kredit</i>
582	<i>Investasi</i>
583	<i>Tabungan</i>
583.1	<i>Deposito</i>
583.2	<i>Tabanas</i>
583.3	<i>Taska</i>
583.4	<i>Tapelpram</i>
584	<i>Bank Pembangunan Daerah</i>
584.1	<i>Bank Kaltim</i>
584.2	<i>BKK, BPR BKK, Bank Pasar</i>
585	<i>Asuransi</i>
585.1	<i>Dana Kecelakaan Lalu Lintas</i>
585.2	<i>Polis</i>
585.3	<i>Premi</i>
585.4	<i>Tertanggung/ Pemegang Polis</i>
585.5	<i>Uang Pertanggungan</i>
586	<i>Alat Pembayaran meliputi : Check, Giro Wesel, Transfer</i>
587	<i>Fiscal</i>
588	<i>Hutang Negara Obligasi</i>
589	<i>Moneter</i>
590	<i>AGRARIA</i>
591	<i>Tata Guna Tanah</i>
591.1	<i>Pemetaan dan Pengukuran</i>
591.2	<i>Perpetaan</i>
591.3	<i>Penyediaan Data, Peta dan Publikasi</i>
591.4	<i>Fakta Tata Guna Tanah</i>
591.5	<i>Tanah Kritis</i>
592	<i>Landreform</i>
592.1	<i>Redistribusi</i>
592.11	<i>Pendaftaran Pemilik dan Pengurus Tanah Pertanian</i>
592.12	<i>Penentuan Tanah Objek Landreform</i>

592.13	<i>Pembagian Tanah Landreform</i>
592.14	<i>Sengketa Redisrtibusi Tanah Objek Landreform</i>
592.2	<i>Ganti Rugi</i>
592.21	<i>Ganti Rugi Tanah Kelebihan</i>
592.22	<i>Sengketa Ganti Rugi Tanah Kelebihan</i>
592.23	<i>Ganti Rugi Tanah Absentee</i>
592.24	<i>Sengketa Ganti Rugi Tanah Absentee</i>
592.25	<i>Ganti Rugi Tanah Partikelir</i>
592.26	<i>Sengketa Ganti Rugi Tanah Partikelir</i>
592.3	<i>Bagi Hasil</i>
592.31	<i>Penetapan Imbangan Gadai Tanah</i>
592.32	<i>Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil</i>
592.33	<i>Sengketa Perjanjian Bagi Hasil</i>
592.4	<i>Gadai Tanah</i>
592.41	<i>Pendaftaran Pelaksanaan Gadai Tanah</i>
592.42	<i>Pelaksanaan Gadai Tanah</i>
592.43	<i>Sengketa Gadai Tanah</i>
592.5	<i>Bimbingan dan Penyuluhan</i>
592.6	<i>Pengembangan</i>
592.7	<i>Yayasan Dana Landreform (YDL)</i>
593	<i>Pengurusan Hak-Hak Tanah</i>
593.1	<i>Penyusunan Program dan Bimbingan Teknis</i>
593.11	<i>Sewa Tanah</i>
593.12	<i>Sewa Tanah Untuk Tanaman Tertentu : Tebu,Tembakau,Rosela,Corchorus.</i>
593.2	<i>Hak Milik</i>
593.21	<i>Perorangan</i>
593.22	<i>Badan Hukum</i>
593.3	<i>Hak Pakai</i>
593.31	<i>Perorangan</i>
593.311	<i>Warga Negara Indonesia</i>
593.312	<i>Warga Negara Asing</i>
593.32	<i>Badan Hukum</i>
593.321	<i>Badan Hukum Indonesia</i>
593.322	<i>Badan Hukum Asing, Kedutaan, Konsulat, Kantor Dagang Asing</i>
593.33	<i>Tanah Gedung-gedung Negeri</i>
593.4	<i>Guna Usaha</i>
593.41	<i>Perkebunan Besar</i>
593.42	<i>Perkebunan Rakyat</i>
593.43	<i>Peternakan</i>
593.44	<i>Perikanan</i>
593.45	<i>Kehutanan</i>
593.5	<i>Hak Guna Bangunan</i>
593.51	<i>Perorangan</i>
593.52	<i>Badan Hukum</i>

593.53	P3MB (Panitia Pelaksanaan Pengusaha Milik Belanda)
593.54	Badan Hukum Asing Belanda- PBK No.5 / 56
593.55	Pemulihan Hak (Pen Pres 4 / 1960)
593.6	Hak Pengelolaan
593.61	PN Perumnas, Bonded Ware House, Industrial Estate, Real Estate
593.62	Perusahaan Daerah Pembangunan Perumahan
593.7	Sengketa Tanah
593.71	Peradilan Perkara Tanah (lihat juga 183)
593.8	Pencabutan dan Pembebasan Tanah
593.81	Pencabutan Hak
593.82	Pembebasan Tanah
593.83	Ganti Rugi Tanah
594	Pendaftaran Tanah
594.1	Pengukuran/ Pemetaan
594.11	Fotogrametri
594.12	Terristris
594.13	Triangulasi
594.14	Peralatan
594.2	Dana Pengukuran (Permen Agraria No.6/ 1960)
594.3	Sertifikat
594.4	Pejabat Pembuatan Akte Tanah
595	Transmigrasi
595.1	Tata Guna Tanah
595.2	Landreform
595.3	Pengurusan Hak-hak Tanah
595.4	Pendaftaran Tanah
600	PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN
601	-

602	-
603	Arsitektur
604	Bahan Bangunan
604.1	Tanah dan Batu
604.2	Aspal
604.3	Besi dan Logam Lainnya
604.31	Besi Beton
604.32	Besi Profil (Konstruksi)
604.33	Paku
604.34	Alumunium Profil
604.4	Bahan Bahan Perlindungan dan Pengawet (Cat, Tech, oil, Pengawet Kayu)
604.5	Semen
604.6	Kayu
604.7	Bahan Penutup Atap
604.8	Alat Alat Penggantung dan Pengunci
604.9	Bahan Bahan Bangunan Lainnya
605	I n s t a l a n s i

605.1	<i>Instalansi Bangunan</i>
605.2	<i>Instalansi Listrik</i>
605.3	<i>Instalansi Air / Sanitasi</i>
605.4	<i>Instalansi Pengatur Udara</i>
605.5	<i>Instalansi Akustik</i>
605.6	<i>Instalansi Cahaya / Penerangan</i>
606	<i>Konstruksi Pencegahan</i>
606.1	<i>Konstruksi Pencegahan Terhadap Kebakaran</i>
606.2	<i>Terhadap Gempa</i>
606.3	<i>Terhadap Angin / Udara / Panas</i>
606.4	<i>Terhadap Kegaduhan</i>
606.5	<i>Terhadap Gas / Explosive</i>
606.6	<i>Terhadap Serangga</i>
606.7	<i>Terhadap Radiasi Atom</i>
610	<i>P E N G A I R A N</i>
611	<i>Irigasi</i>
611.1	<i>Bangunan Waduk</i>
611.11	<i>Bendungan</i>
611.12	<i>Tanggul</i>
611.13	<i>Pelimpahan Banjir</i>
611.14	<i>Menara Pengambilan</i>
611.15	<i>Pembangunan Dermaga</i>
611.2	<i>Bangunan Pengambilan</i>
611.21	<i>Bendungan</i>
611.22	<i>Bendungan Dengan Pintu Bilas</i>
611.23	<i>Bendungan Dengan Pompa</i>
611.24	<i>Pengambilan Bebas</i>
611.25	<i>Pengambilan Bebas Dengan Pompa</i>
611.26	<i>Sumur Dengan Pompa</i>
611.27	<i>Kantung Lumpur</i>
611.28	<i>Silf Ekstreter</i>
611.29	<i>Escope Chenel</i>
611.3	<i>Bangunan Pembawa</i>
611.31	<i>Saluran</i>
611.311	<i>Saluran Induk</i>
611.312	<i>Saluran Sekunder</i>
611.313	<i>Suplesi</i>
611.314	<i>Tersier</i>
611.315	<i>Saluran Kwarter</i>
611.316	<i>Saluran Pasangan</i>
611.317	<i>Saluran Tertutup/ Terowongan</i>
611.32	<i>Bangunan</i>
611.321	<i>Bangunan Bagi</i>
611.322	<i>Bangunan dan Sadap</i>
611.323	<i>Bangunan Sadap</i>
611.324	<i>Bangunan Check</i>

611.325	Bangunan Terjun
611.33	Bax Tersier
611.34	Got Miring
611.35	Talang
611.36	Syphon
611.37	Gorong-gorong
611.38	Pelimpahan Samping
611.4	Bangunan Pembuangan
611.41	Saluran
611.411	Saluran Pembuangan Induk
611.412	Saluran Pembuangan Sekunder
611.413	Saluran Pembuangan Tersier
611.42	Bangunan
611.421	Bangunan Outlet
611.422	Bangunan Terjun
611.423	Bangunan Penahan Banjir
611.43	Gorong-gorong Pembuangan
611.44	Talang Pembuang
611.45	Syphon Pembuangan
611.5	Bangunan Lainnya
611.51	Jalan
611.511	Jalan Inspeksi
611.512	Jalan Logistik
611.52	Jembatan
611.521	Jembatan Inspeksi
611.522	Jembatan Hewan
611.53	Tangga Cuci
611.54	Kubangan Kerbau
611.55	Waduk Lapangan
611.56	Bangunan Penunjang
611.57	Jaringan Telepon
611.58	Stasiun Argo
611.59	Bangunan TPI dan Pasar Ikan
612	Polder
612.1	Tangul Keliling
612.11	Tanggul
612.12	Bangunan Penutup Sungai
612.13	Jembatan
612.2	Bangunan Pembawa
612.21	Saluran
612.211	Saluran Muka
612.212	Saluran Pembawa Induk
612.213	Saluran Pembawa Sekunder
612.214	Saluran Stasiun Pompa Pemasukan
612.22	Bangunan Bagi:
612.221	Gorong-Gorong

612.222	Syphon
612.3	Bangunan Pembuangan
612.31	Stasiun Pompa Pembuangan
612.32	Saluran
612.321	Saluran Pembawa Induk
612.322	Saluran Pembawa Sekunder
612.33	Pintu Air Pembuangan
612.34	Gorong-gorong Pembuangan
612.35	Syphon Pembuangan
612.4	Bangunan Lainnya
612.41	Bangunan
612.411	Bangunan Pengukur Air
612.412	Bangunan Pengukur Curah Hujan
612.413	Bangunan Gudang Stasiun Pompa
612.414	Bangunan Listrik Stasiun Pompa
612.42	Rumah Petugas Eksploitasi
613	Pasang Surut
613.1	Bangunan Pembawa
613.11	Saluran Pembawa Induk
613.12	Saluran Pembawa Sekunder
613.13	Saluran Pembawa Tersier
613.14	Saluran Penyimpanan Air
613.15	Saluran Pintu Pembuangan
613.2	Bangunan Pembuangan
613.21	Saluran Pembawa Induk
613.22	Saluran Pembawa Sekunder
613.23	Saluran Pembawa Tersier
613.24	Saluran Penyimpanan Air
613.25	Saluran Pintu Pembuangan
613.3	Bangunan Lainnya
613.31	Kolom Pasang
613.32	Saluran
613.321	Saluran Lalu Lintas
613.322	Saluran Muka
613.33	Bangunan
613.331	Bangunan Penangkis Kotoran
613.332	Bangunan Pengukur Muka Air
613.333	Bangunan Pengukur Curah Hujan
613.34	Jalan
613.35	Jembatan
614	Pengendalian Sungai
614.1	Bangunan Pengaman
614.11	Tanggul Banjir
614.12	Pintu Pengatur Banjir
614.13	Klep Pengatur Banjir
614.14	Tembok Pengaman Talut

614.15	Krib
614.16	Kantung Lumpur
614.17	Check Dam
614.18	Syphon
614.2	Saluran Pengaman
614.21	Saluran Banjir
614.22	Saluran Drainage
614.23	Corepure
614.3	Bangunan Lainnya
614.31	Warning System
614.32	Stasiun
614.321	Stasiun Pengukur Curah Hujan
614.322	Stasiun Pengukur Air
614.323	Stasiun Pengukur Cuaca
614.324	Stasiun Pos Penjagaan
615	Pengaman Pantai
615.1	Tanggul
615.2	Krib
615.3	Bangunan Lainnya
616	Air Permukaan (Danau, Waduk, Sungai)
616.1	Stasiun Pompa
616.2	Bangunan Pembawa
616.3	Bangunan Pembuangan
616.4	Bangunan Lainnya
620	JALAN
621	Jalan Kota / Kabupaten
621.1	Daerah Penguasaan
621.11	Tanah
621.12	Tanaman
621.13	Bangunan
621.2	Bangunan Sementara
621.21	Jalan Sementara
621.22	Kantor Proyek
621.23	Gedung Proyek
621.24	Barak Kerja
621.25	Laboratorium Lapangan
621.26	Rumah
621.3	Badan Jalan
621.31	Pekerjaan Tanah (Earth Work)
621.32	Stabilisasi
621.4	Perkerasan
621.41	Lapisan Pondasi Bawah
621.42	Lapisan Pondasi
621.43	Lapisan Permukaan
621.5	Drainage
621.51	Parit Tanah

621.52	Gorong-gorong (Culvert)
621.6	Buku Trotoir
621.61	Tanah
621.62	Perkerasan
621.63	Pasangan
621.7	Medium
621.71	Tanah
621.72	Tanaman
621.73	Perkerasan
621.74	Pasangan
621.8	Daerah Sampingan
621.81	Tanaman
621.82	Pagar
621.9	Bangunan Pelengkap dan Pengamanan
621.91	Rambu-rambu / Tanda-tanda Lalu Lintas
621.92	Lampu Penerangan
621.93	Lampu Pengaturan Lalu Lintas
621.94	Patok-patok KM
621.95	Patok-patok R.O.W.(Sempadan)
621.96	Rel Pengamanan
621.97	Pagar
621.98	Turap Penahan
621.99	Bronjong
622	Jalan Provinsi
622.1	Daerah Penguasaan
622.11	Tanah
622.12	Tanaman
622.13	Bangunan
622.14	Jalan Sementara
622.15	Jembatan Sementara
622.16	Kantor/Gedung Proyek
622.17	Barak Kerja
622.18	Laboraturium Lapangan
622.19	Rumah .
622.2	Badan Jalan
622.21	Pekerjaan Tanah (Earth Work)
622.22	Stabilisasi
622.3	Perkerasan (Pavement)
622.31	Lapis Pondasi Bawah
622.32	Lapis Pondasi
622.33	Lapis Permukaan
622.4	Drainage
622.41	Parit
622.42	Gorong-gorong (culvert)
622.43	Buku Trotoir
622.44	Tanah

622.45	<i>Perkerasan</i>
622.5	<i>Trottoir</i>
622.51	<i>Tanah</i>
622.52	<i>Perkerasan</i>
622.6	<i>Medium</i>
622.61	<i>Tanah</i>
622.62	<i>Tanaman</i>
622.63	<i>Perkerasan</i>
622.64	<i>Pasangan</i>
622.7	<i>Daerah Samping</i>
622.71	<i>Tanaman</i>
622.72	<i>Pagar</i>
622.8	<i>Bangunan Perlengkapan dan Pengamanan</i>
622.81	<i>Rambu-rambu</i>
622.82	<i>Lampu Penerbangan</i>
622.83	<i>Lampu Pengatur Lalu Lintas</i>
622.84	<i>Patok-patok KM</i>
622.85	<i>Patok-patok R, O, W (Sempadan)</i>
622.86	<i>Rel Pengamanan</i>
622.87	<i>Pagar</i>
622.88	<i>Turap Penahan</i>
622.89	<i>Bronjong</i>
633	<i>Jalan Nasional</i>
633.1	<i>Daerah Penguasaan</i>
633.2	<i>Badan Jalan</i>
633.3	<i>Perkerasan (lapis pondasi, lapis permukaan)</i>
633.4	<i>Drainase (gorong-gorong, parit)</i>
633.5	<i>Median</i>
633.6	<i>Daerah Samping (pagar, tanaman)</i>
633.7	<i>Bangunan Pelengkap dan Pengamanan (rambu-rambu)</i>
630	<i>JEMBATAN</i>
631	<i>Jembatan Pada Jalan Kota/Kabupaten</i>
631.1	<i>Daerah Penguasaan</i>
631.11	<i>Tanah</i>
631.12	<i>Tanaman</i>
631.13	<i>Bangunan</i>
631.2	<i>Bangunan Sementara</i>
631.21	<i>Jalan Sementara</i>
631.22	<i>Jembatan Sementara</i>
631.23	<i>Kantor Proyek</i>
631.24	<i>Gedung Proyek</i>
631.25	<i>Barak Kerja</i>
631.26	<i>Laboratorium Lapangan</i>
631.27	<i>Rumah</i>
631.3	<i>Pekerjaan Tanah (earth work)</i>
631.31	<i>Galian Tanah</i>

631.32	<i>Timbunan Tanah</i>
631.4	<i>Pondasi</i>
631.41	<i>Pondasi Kepala Jembatan</i>
631.42	<i>Pondasi Pilar</i>
631.43	<i>Pondasi Angker</i>
631.5	<i>Bangunan Bawah</i>
631.51	<i>Kepala Jembatan</i>
631.52	<i>Pilar</i>
631.53	<i>Piloon</i>
631.54	<i>Landasan</i>
631.6	<i>Bangunan</i>
631.61	<i>Gelagar '</i>
631.62	<i>Lantai</i>
631.63	<i>Perkerasan</i>
631.64	<i>Jalan Orang/ Trotoar</i>
631.65	<i>Sandaran</i>
631.66	<i>Talang Air</i>
631.7	<i>Bangunan Pengaman</i>
631.71	<i>Turap/ Penahan</i>
631.72	<i>Bronjong</i>
631.73	<i>Strek Dam</i>
631.74	<i>Kist Dam</i>
631.75	<i>Coupute</i>
631.76	<i>Krip</i>
631.8	<i>Bangunan pelengkap</i>
631.81	<i>Rambu-rambu/ Tanda-tanda Lalu Lintas</i>
631.82	<i>Patok Pengamanan</i>
631.83	<i>Patok R, O, W (Sempadan)</i>
631.9	<i>Oprit</i>
631.91	<i>Badan</i>
631.92	<i>Perkerasan</i>
631.93	<i>Drainage</i>
631.94	<i>Baku</i>
631.95	<i>Mediun</i>
632	<i>Jembatan Pada Jalan Provinsi</i>
632.1	<i>Daerah Penguasaan</i>
632.11	<i>Tanah</i>
632.12	<i>Tanaman</i>
632.13	<i>Bangunan</i>
632.2	<i>Bangunan Sementara</i>
632.21	<i>Jalan Sementara</i>
632.22	<i>Jembatan Sementara</i>
632.23	<i>Kantor Proyek</i>
632.24	<i>Gedung Proyek</i>
632.25	<i>Barak Kerja</i>
632.26	<i>Laboratorium Lapangan</i>

632.27	<i>Rumah</i>
632.3	<i>Pekerjaan Tanah (earth work)</i>
632.31	<i>Galian Tanah</i>
632.32	<i>Timbunan Tanah</i>
632.4	<i>Pondasi</i>
632.41	<i>Pondasi Kepala Jembatan</i>
632.42	<i>Pondasi Pilar</i>
632.43	<i>Pondasi Angker</i>
632.5	<i>Bangunan Bawah</i>
632.51	<i>Kepala Jembatan</i>
632.52	<i>Pilar</i>
632.53	<i>Piloon</i>
632.54	<i>Landasan</i>
632.6	<i>Bangunan</i>
632.61	<i>Gelagar</i>
632.62	<i>Lantai</i>
632.63	<i>Perkerasan</i>
632.64	<i>Jalan Orang/Trotoar</i>
632.65	<i>Sandaran</i>
632.66	<i>Talang Air</i>
632.7	<i>Bangunan Pengaman</i>
632.71	<i>Turap/ Penahan</i>
632.72	<i>Bronjong</i>
632.73	<i>Strek Dam</i>
632.74	<i>Kist Dam</i>
632.75	<i>Coupute</i>
632.76	<i>Krip</i>
632.8	<i>Bangunan Pelengkap</i>
632.81	<i>Rambu-rambu/ Tanda-tanda Lalu Lintas</i>
632.82	<i>Patok Pengamanan</i>
632.83	<i>Patok R, O, W (Sempadan)</i>
632.9	<i>Oprit</i>
632.91	<i>Badan</i>
632.92	<i>Perkerasan</i>
632.93	<i>Drainage</i>
632.94	<i>Baku</i>
632.95	<i>Mediun</i>
633	<i>Jembatan Pada Jalan Nasional</i>
633.1	<i>Daerah Penguasaan (tanah, tanaman, bangunan)</i>
633.2	<i>Bangunan Sementara (gudang proyek, kantor proyek)</i>
633.3	<i>Pondasi</i>
633.4	<i>Bangunan Bawah</i>
633.5	<i>Bangunan (gelagar, lantai, sandaran, perkerasan)</i>
633.6	<i>Bangunan Pengamanan (bronjong strek dam, krib)</i>
633.7	<i>Bangunan Pelengkap dan Pengaman (rambu-rambu)</i>
640	<i>BANGUNAN</i>

641	Bangunan Pemerintah
641.1	Gedung Pengadilan
641.2	Rumah Pejabat Negara
641.3	Gedung DPR
641.4	Gedung Balai Kota
641.5	Penjara
641.6	Perkantoran
642	Bangunan Pendidikan
642.1	Taman Kanak-kanak
642.2	SD & Sekolah Menengah
642.3	Perguruan Tinggi
643	Bangunan Rekreasi
643.1	Bangunan Olah raga
643.2	Gedung Kesenian
643.3	Gedung Pemancar
644	Bangunan Perdagangan
644.1	Pusat Perbelanjaan
644.2	Gedung Perdagangan
644.3	B a n k
644.4	Perkantoran
645	Bangunan Pelayanan Umum
645.1	Mandi, Cuci, Kakus (MCK) Umum
645.2	Gedung parkir
645.3	Rumah Sakit
645.4	Gedung telkom
645.5	Terminal Angkutan Umum
645.6	Terminal Angkutan Air
645.7	Terminal Angkutan Darat
645.8	Bangunan Keagamaan
646	Bangunan Peninggalan Sejarah
646.1	Monumen
646.2	Candi
646.3	Kraton
646.4	Rumah Tradisional
647	Bangunan Industri
648	Bangunan Tempat Tinggal
648.1	Rumah Perkantoran
648.11	Inti / Sederhana
648.12	Sedang / Mewah
648.2	Rumah Pedesaan
648.21	Rumah Contoh
648.3	Real Estate
649	Elemen Bangunan
649.1	Pondasi
649.11	Diatas Tiang
649.2	Dinding

649.21	<i>Penahan Beban</i>
649.22	<i>Tidak Menahan Beban</i>
649.3	<i>A t a p</i>
649.4	<i>Lantai / Langit-langit</i>
649.41	<i>Suspendend</i>
649.42	<i>Solit</i>
649.5	<i>Pintu / Jendela</i>
649.51	<i>Pintu Hermonik</i>
649.52	<i>Pintu Biasa</i>
649.53	<i>Pintu Sorong</i>
649.54	<i>Jendela Kayu</i>
649.55	<i>Jendela Sorong</i>
649.56	<i>Jendela Vertikal</i>
650	<i>TATA RUANG KOTA</i>
651	<i>Daerah Perdagangan / Pelabuhan</i>
651.1	<i>Daerah Pusat Perbelanjaan</i>
651.2	<i>Daerah Perkantoran</i>
652	<i>Daerah Pemerintahan</i>
653	<i>Daerah Perumahan (Site dan Servei)</i>
653.1	<i>Kepadatan Rendah (Low Density)</i>
653.2	<i>Kepadatan Tinggi (High Density)</i>
654	<i>Daerah Industri</i>
654.1	<i>Industri Berat</i>
654.2	<i>Industri Ringan</i>
654.3	<i>Industri Rumah (Home Industri)</i>
655	<i>Daerah Rekreasi (Open Spece)</i>
655.1	<i>Publik Garden</i>
655.2	<i>Sport dan Playing Fields</i>
655.3	<i>Open Spece</i>
656	<i>Transportasi (Tata Letak)</i>
656.1	<i>Jaringan Jalan</i>
656.11	<i>Penerangan Jalan</i>
656.2	<i>Jaringan Kereta Api</i>
656.3	<i>Jaringan Sungai</i>
657	<i>Assineering</i>
657.1	<i>Saluran Pengumpulan</i>
657.2	<i>Instansi Pengolahan</i>
657.21	<i>Bangunan</i>
657.22	<i>Bangunan Penyaring</i>
657.23	<i>Bangunan Penghancur Kotoran</i>
657.24	<i>Bangunan Pengendapan</i>
657.25	<i>Bangunan Pengereng Lumpur</i>
657.26	<i>Unit Disinfektan</i>
657.27	<i>Unit Perpompaaan</i>
658	<i>Kesehatan Lingkungan</i>
658.1	<i>Persampahan</i>

658.11	Bangunan Pengumpulan
658.12	Bangunan Pemusnahan
658.2	Pengotoran Udara
658.3	Pengotoran Air
658.31	Air Buangan Industri
658.4	Kegaduhan
658.5	Kebersihan Kota
660	TATA LINGKUNGAN
660.1	Lingkungan Hidup
660.2	Kebersihan Lingkungan
660.3	Pencemaran
660.31	Pencemaran Air
660.32	Pencemaran Udara
660.33	Pencemaran Tanah
660.34	Pencemaran Limbah Padat dan Bahan Berbahaya Beracun (B3)
661	Kerusakan Lingkungan
661.1	Konservasi Pesisir dan Laut
661.2	Konservasi Sumber Daya Alam
662	Pentaatan Hukum Lingkungan
663	Laboratorium Lingkungan
663.1	Air
663.2	Udara
663.3	Tanah
664	Analisis Dampak Lingkungan
665	Pengembangan Teknologi Lingkungan
666	Pengembangan Kapasitas
667	Pengamanan Lingkungan
670	KETENAGAAN
670.1	Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD)
671	Listrik
671.1	Kelistrikan
671.11	Perijinan
671.12	Rekomendasi
671.13	Pembinaan dan Pengawasan
671.11	Kelistrikan PLN
671.12	Kelistrikan Non PLN
671.2	Pembangkit Tenaga Listrik
671.21	PLTA - Pembangkit Listrik Tenaga Air
671.22	PLTD - Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
671.23	PLTG - Pembangkit Listrik Tenaga Gas
671.24	PLTM - Pembangkit Listrik Tenaga Matahari
671.25	PLTN - Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir
671.26	PLTN - Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
671.27	PLTU - Pembangkit Listrik Tenaga Uap
671.3	Transmisi Tenaga Listrik
671.31	Gardu Induk/Gardu Penghubung/Gardu Trafo

671.32	Saluran Udara Tenaga Listrik
671.33	Kabel Bawah Tanah
671.4	Distribusi Tenaga Listrik
671.41	Gardu Distribusi
671.42	Tegangan Menengah
671.43	Tegangan Rendah
671.44	Jaringan Bawah Tanah
671.5	Pengusahaan Listrik
671.51	Sambungan Listrik
671.52	Penjualan Tenaga Listrik
671.53	Tarif Listrik
672	Tenaga Air
673	Tenaga Minyak
674	Tenaga Gas
675	Tenaga Matahari
676	Tenaga Nuklir
677	Tenaga Panas Bumi
678	Tenaga Uap
679	Tenaga Lainnya
680	PERALATAN PEKERJAAN UMUM
690	AIR MINUM
691	Intako
691.1	Bromcaptering
691.2	Sumur
691.3	Bendungan
691.4	Saringan (screen)
691.5	Pintu air
691.6	Saluran Pembawa
691.7	Alat Ukur
691.8	Perpompaan
692	Transmisi Air Baku
692.1	Perpipaan
692.2	Katup Udara (Air Rolief)
692.3	Tutup Penguras (blow oof)
692.4	Bak Pelepas Tekanan
692.5	Jembatan Pipa
692.6	Syphon
693	Instalasi Pengelolaan
693.1	Bangunan Ukur
693.2	Bangunan Aerasi
693.3	Bangunan Pengendapan
693.4	Bangunan Pembubuh Bahan Kimia
693.5	Bangunan Pengaduk
693.6	Bangunan Saringan
693.7	Perpompaan
693.8	Clear Hell

694	<i>Distribusi</i>
694.1	<i>Reservoir Menara Bawah Tanah</i>
694.11	<i>Menara</i>
694.12	<i>Reservoir Menara Bawah Tanah</i>
694.2	<i>Perpipaan</i>
694.3	<i>Perpompaan</i>
694.4	<i>Jembatan Pipa</i>
694.5	<i>Syphon</i>
694.6	<i>Hydran</i>
694.61	<i>Hydran Umum</i>
694.62	<i>Hydran Kebakaran</i>
694.7	<i>Katup</i>
694.71	<i>Katup Udara (air relief)</i>
694.72	<i>Katup Pelepas (blow off)</i>
694.8	<i>Bak Pelepas Tekanan (pressuer reducing valve)</i>
700	<i>PENGAWASAN</i>
700.1	<i>Kebijakan dan Program Pengawasan</i>
700.2	<i>Pengawasan Perencanaan Pengadaan/ Proyek</i>
701	<i>Pengawasan Inventarisasi Asset</i>
702	<i>Pengawasan Organisasi dan Tata Laksana</i>
703	<i>Pengawasan Perpustakaan dan Dokumen</i>
704	<i>Pengawasan Penelitian/ Riset</i>
705	<i>Pengawasan Perhubungan, Komunikasi Informasi dan Teknologi</i>
706	<i>Pengawasan Pertahanan/ BPN</i>
710	<i>BIDANG PEMERINTAHAN</i>
711	<i>Pengawasan Pemerintahan Provinsi</i>
712	<i>Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</i>
713	<i>Pengawasan Pemerintah Desa</i>
720	<i>BIDANG POLITIK</i>
721	<i>Pengawasan Partai termasuk Pendanaan Partai, Atribut Partai dll</i>
722	<i>Pengawasan Pembinaan Ipoleksosbudhankam</i>
723	<i>Pengawasan Organisasi meliputi Organisasi Kemasyarakatan, Profesi, Wanita, Buruh/ Tani dan Kepemudaan</i>
724	<i>Pengawasan terhadap kepercayaan terhadap Tuhan YME</i>
730	<i>BIDANG KEAMANAN/ KETERTIBAN</i>
731	<i>Pengawasan Kesbangpolinmas</i>
732	<i>Pengawasan pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam/ SAR</i>
740	<i>BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT</i>
741	<i>Pengawasan Pembangunan Desa</i>
742	<i>Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan</i>
743	<i>Pengawasan Kebudayaan</i>
744	<i>Pengawasan Kesehatan/ Makanan/ Obat</i>
745	<i>Pengawasan SARA (Suku Agama Ras)</i>
746	<i>Pengawasan Kesejahteraan Sosial</i>
747	<i>Pengawasan Kependudukan Migrasi/ Urbanisasi</i>

748	<i>Pengawasan Kehumasan, Media Massa dan Penyiaran</i>
749	<i>Pengawasan Bantuan/ Subsidi Masyarakat</i>
750	BIDANG PEREKONOMIAN
751	<i>Pengawasan Perdagangan dan Perindustrian</i>
752	<i>Pengawasan Pertanian dan Perkebunan</i>
753	<i>Pengawasan Kehutanan</i>
754	<i>Pengawasan Pertambangan/ ESDM</i>
755	<i>Pengawasan Peternakan dan Kesehatan Hewan</i>
756	<i>Pengawasan Tenaga Kerja dan Ketrasmigrasian</i>
757	<i>Pengawasan PMDN/ PMA</i>
758	<i>Pengawasan Perbankan/ Moneter</i>
759	<i>Pengawasan Kelautan dan Perikanan</i>
760	BIDANG PEKERJAAN UMUM
761	<i>Pengawasan Pengairan</i>
762	<i>Pengawasan Jalan</i>
763	<i>Pengawasan Jembatan</i>
764	<i>Pengawasan Bangunan</i>
765	<i>Pengawasan Tata Ruang Kota</i>
766	<i>Pengawasan Tata Lingkungan</i>
767	<i>Pengawasan Ketenagaan</i>
768	<i>Pengawasan Air Minum</i>
770	PENGAWASAN PEJABAT PUBLIK
771	<i>Penyimpangan Pejabat Publik</i>
780	BIDANG KEPEGAWAIAN
781	<i>Pengawasan Pengadaan PNS</i>
782	<i>Pengawasan Penilaian dan Disiplin PNS</i>
783	<i>Keanggotaan PNS Dalam Parpol</i>
784	<i>Penyimpangan Pejabat/ PNS</i>
785	<i>Persengketaan PNS</i>
790	BIDANG KEUANGAN
791	<i>Pengawasan Anggaran</i>
792	<i>Pengawasan Akuntansi</i>
793	<i>Pengawasan Perbendaharaan</i>
794	<i>Pengawasan Pengelolaan Kas Daerah</i>
795	<i>Pengawasan Pendapatan</i>
800	KEPEGAWAIAN <i>termasuk Klasifikasi Disini : Kebijakan Kepegawaian</i>
800.1	<i>Perencanaan</i>
800.2	<i>Penelitian</i>
800.3	<i>Statistik '</i>
810	PENGADAAN <i>meliputi Lamaran, Pengujian Kesehatan dan Pengangkatan Calon Pegawai</i>
811	<i>Pendaftaran CPNS</i>
811.1	<i>Testing</i>
811.2	<i>Screening</i>

811.3	Pengumuman tes dan Pemanggilan
812	Pengujian Kesehatan
813	Pengangkatan CPNS
813.1	Pengangkatan CPNS golongan I
813.2	Pengangkatan CPNS golongan II
813.3	Pengangkatan CPNS golongan III
820	MUTASI .
821	Pengangkatan
821.1	Pengangkatan CPNS Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
821.11	Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Golongan I
821.12	Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Golongan II
821.13	Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Golongan III
821.2	Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural, Pembebasan dari Jabatan, Berita Acara Serah Terima Jabatan, Pernyataan Menduduki Jabatan, Sumpah Janji
821.21	Eselon 1
821.22	Eselon 2
821.23	Eselon 3
821.24	Eselon 4
821.3	Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional, Pemberhentian Sementara, Pengangkatan Kembali, Pernyataan Menduduki Jabatan, Sumpah Janji
822	Kenaikan Gaji Berkala
822.1	PNS Golongan I
822.2	PNS Golongan II
822.3	PNS Golongan III
822.4	PNS Golongan IV
823	Kenaikan Pangkat
823.1	PNS Golongan I
823.2	PNS Golongan II
823.3	PNS Golongan III
823.4	PNS Golongan IV
824	Pemindahan/ Pelimpahan/ Pembantuan
824.1	PNS Golongan I
824.2	PNS Golongan II
824.3	PNS Golongan III
824.4	PNS Golongan IV
824.5	Lolos Butuh (Mutasi Pegawai dari Instansi Lain)
825	Datasering dan Penempatan Kembali
827	Wajib Militer
830	KEDUDUKAN
831	Peninjauan Masa Kerja
832	Penyesuaian Perangkat/ Gaji
832.1	PNS Golongan I
832.2	PNS Golongan II
832.3	PNS Golongan III
832.4	PNS Golongan IV

833	<i>Penghargaan Ijasah (pencantuman gelar)</i>
834	<i>Penghargaan Lainnya</i>
840	KESEJAHTERAAN PEGAWAI
841	<i>Tunjangan</i>
841.1	<i>Struktural dan Fungsional</i>
841.2	<i>Kehormatan</i>
841.3	<i>Dana Kematian (Uang Duka)</i>
841.4	<i>Tambahan Penghasilan</i>
841.5	<i>Tunjangan Cacat</i>
842	<i>Dana</i>
842.1	<i>Taspen</i>
842.2	<i>Askes, Bantuan Kesehatan</i>
842.3	<i>Bantuan Pendidikan</i>
843	<i>Perawatan Kesehatan</i>
843.1	<i>Poliklinik , Klinik Konsultasi</i>
843.2	<i>Perawatan Dokter</i>
843.3	<i>Obat-obatan</i>
843.4	<i>Keluarga Berencana</i>
845	<i>Perumahan PNS</i>
846	<i>Dispensasi</i>
850	C U T I
851	<i>Cuti Tahunan</i>
852	<i>Cuti Besar</i>
853	<i>Cuti Sakit</i>
854	<i>Cuti Bersalin</i>
855	<i>Cuti Karna Alasan Penting</i>
856	<i>Cuti di Luar Tanggungan Negara</i>
860	PENILAIAN
861	<i>Penghargaan</i>
861.1	<i>Bintang / Satyalencana Karya Satya</i>
861.2	<i>Kenaikan Pangkat Anumerta</i>
861.3	<i>Hadiah Berupa Kenaikan Pangkat</i>
861.4	<i>Pegawai Teladan</i>
862	<i>Hukuman</i>
862.1	<i>Ringan</i>
862.2	<i>Sedang</i>
862.3	<i>Berat</i>
863	<i>Konduite / DP3</i>
864	<i>Ujian Dinas</i>
864.1	<i>Tingkat I</i>
864.2	<i>Tingkat II</i>
865	<i>Penilaian Kinerja</i>
865.1	<i>Struktural</i>
865.2	<i>Fungsional</i>
866	<i>Rehabilitasi</i>
870	TATA USAHA KEPEGAWAIAN

871	Formasi
872	Bezetting / Daftar Urut Kepegawaian
873	Registrasi, Sistem Informasi Kepegawaian
873.1	NIP
873.2	KARPEG
873.3	Legitimasi / Tanda Pengenal
873.4	Daftar Keluarga
873.5	KARSU / KARIS
874	Daftar Riwayat Pekerjaan
874.1	Tanggal Lahir
874.2	Penggantian Nama
875	Kewenangan Mutasi Kepegawaian
875.1	Pelimpahan Wewenangan
875.2	Spesimen Tanda Tangan
876	Korps Kepegawaian
880	PEMBERHENTIAN
881	Atas Permintaan Sendiri Termasuk Pengunduran Diri
882	Dengan Hak Pensiun
882.1	Pemberhentian Dengan Hak Pensiun PNS Gol.I
882.2	Pemberhentian Dengan Hak Pensiun PNS Gol.II
882.3	Pemberhentian Dengan Hak Pensiun PNS Gol.III
882.4	Pemberhentian Dengan Hak Pensiun PNS Gol.IV
882.5	Pensiun Janda / Duda
882.6	Pensiun Yatim Piatu
882.7	Uang Muka Pensiun
883	Karena Meninggal
884	Alasan Lain, diantaranya Keuzuran Jasmani
885	Tidak Dengan Hormat
886	Pembekalan PNS Yang Akan Purna Tugas
887	Tali Asih Pensiun
890	PENDIDIKAN PEGAWAI
890.1	Perencanaan Program dan Pelaporan Diklat
891	Pendidikan Prajabatan
892	Pendidikan Dalam Jabatan
892.1	Diklatpim
892.2	Diklat Teknis
892.3	Diklat Fungsional
893	Kursus-kursus ,Penataran , Bimbingan Teknis
894	Pengembangan Pegawai
894.1	Tugas Belajar
894.2	Ijin Belajar
894.3	Tunjangan Belajar
894.4	Bantuan Pendidikan
894.5	Penempatan Kembali
895	Metode
895.1	Kuliah

895.2	<i>Ceramah , Symposium</i>
895.3	<i>Diskusi</i>
895.4	<i>Kuliah Lapangan / OL, Widya Wisata, KKN</i>
895.5	<i>Kurikulum</i>
895.6	<i>Karya Tulis</i>
896	<i>Tenaga Pengajar, Narasumber</i>
897	<i>Administrasi Pendidikan</i>
898	<i>Fasilitas Pendidikan</i>
899	<i>Sarana Pendidikan</i>
900	<i>KEUANGAN</i>
901	<i>Nota Keuangan</i>
902	<i>APBN</i>
903	<i>APBD</i>
910	<i>ANGGARAN</i>
911	<i>Keputusan tentang Penunjukan Pengelola Keuangan SKPD / PPKD</i>
912	<i>Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis BLUD</i>
913	<i>DPA / DPPA / DPAL-SKPD / PPKD</i>
914	<i>Anggaran Kas</i>
915	<i>Surat Penyediaan Dana (SPD)</i>
920	<i>AKUNTANSI</i>
921	<i>Laporan-laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD</i>
930	<i>PERBENDAHARAAN</i>
931	<i>Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)</i>
932	<i>Surat Penolakan Penerbitan SP2D</i>
933	<i>Daftar Penguji SP2D</i>
940	<i>PEMBINAAN KEBENDAHARAAN</i>
941	<i>Bimtek-bimtek / Kursus Yang Berkaitan Dengan Keuangan</i>
950	<i>PENGELOLAAN KAS DAERAH</i>
951	<i>Laporan Pemotongan IWP, Taperum, PPh 21 dari gaji</i>
952	<i>Laporan Rekapitulasi Penerimaan Daerah</i>
953	<i>Daftar Pemotongan dan Penyetoran Pajak (PPN / PPh) dari CV/PT Instansi</i>
954	<i>Surat Tanda Setoran (STS)</i>
955	<i>Laporan Realisasi Daerah</i>
955.1	<i>Laporan Realisasi Penerimaan Daerah</i>
955.2	<i>Laporan Realisasi Pengeluaran Daerah</i>
956	<i>Rekonsiliasi</i>
956.1	<i>Surat Rekonsiliasi Penerimaan</i>
956.2	<i>Laporan Rekonsiliasi Bank</i>
957	<i>Laporan Mutasi Penempatan Deposito</i>
958	<i>Surat Perintah Transfer Uang (SPTU)</i>
960	<i>EVALUASI DAN PENGENDALIAN</i>
961	<i>Tuntutan Ganti Rugi</i>
962	<i>Tuntutan Perbandaharaan</i>
963	<i>Evaluasi dan Perubahan APBD Kabupaten / Kota</i>

964	<i>Evaluasi dan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten / Kota</i>
965	<i>Edaran-edaran</i>
970	<i>PENDAPATAN</i>
971	<i>Perimbangan Keuangan</i>
971.1	<i>Bagi Hasil Pajak</i>
971.11	<i>Pajak Bumi Bangunan (PBB)</i>
971.12	<i>Bela Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PBHTB)</i>
971.13	<i>Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh Pasal 21)</i>
971.2	<i>Bagi Hasil Bukan Pajak</i>
971.21	<i>Sumber Daya Alam / Migas</i>
972	<i>Subsidi</i>
973	<i>Pajak</i>
973.1	<i>Pajak Kendaraan Bermotor</i>
973.2	<i>Pajak Kendaraan Diatas Air</i>
973.3	<i>Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor</i>
973.4	<i>Pajak Pengendalian dan Pemanfaatan Air Permukaan</i>
973.5	<i>Pajak Reklame</i>
974	<i>Retribusi</i>
974.1	<i>Retribusi Bidang Kesehatan</i>
974.2	<i>Retribusi Bidang Seni Budaya dan Pariwisata</i>
974.3	<i>Retribusi Bidang Perekonomian, Perindustrian dan Perdagangan (termasuk Pasar)</i>
974.4	<i>Retribusi Bidang Pertanian dan Perternakan (termasuk Pemotongan Hewan)</i>
974.5	<i>Retribusi Bidang Perhubungan, Komunikasi Informasi dan Teknologi (termasuk Trayek, Kelebihan Muatan, Telekomunikasi, Parkir dll)</i>
974.6	<i>Retribusi Bidang Perkebunan dan Kehutanan (termasuk Lintas dan Lelang Hasil Hutan, Flora Fauna dll)</i>
974.7	<i>Retribusi Bidang Perikanan dan Kelautan</i>
974.8	<i>Retribusi Bidang Pertambangan, Pemanfaatan Air Permukaan dan Metrologi</i>
974.9	<i>Retribusi Bidang Lainnya (termasuk sampah)</i>
975	<i>Bea</i>
975.1	<i>Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor</i>
975.2	<i>Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air</i>
976	<i>Cukai</i>
977	<i>Pungutan</i>
978	<i>Bantuan</i>
978.1	<i>Bantuan Presiden</i>
978.2	<i>Bantuan Menteri</i>
978.3	<i>Bantuan Gubernur</i>
978.4	<i>Bantuan Bupati</i>
978.5	<i>Bantuan Lainnya</i>
979	<i>Pendapatan Lainnya</i>
979.1	<i>Hasil Penjualan Asset Daerah Yang Tidak Dipisahkan</i>
979.11	<i>Pelepasan Hak Atas Tanah</i>

979.12	<i>Penjualan Rumah Jabatan / Rumah Dinas</i>
979.13	<i>Penjualan Kendaraan Dinas Roda 2</i>
979.14	<i>Penjualan Kendaraan Dinas Roda 4</i>
979.15	<i>Penjualan Bongkaran Bangunan Dan Inventaris</i>
979.16	<i>Penjualan Drum Bekas</i>
979.17	<i>Penjualan Hasil Penebangan Pohon</i>
979.2	<i>Penerimaan Jasa Giro</i>
979.21	<i>Jasa Giro Kas Daerah</i>
979.22	<i>Jasa Giro Pemegang Kas</i>
979.23	<i>Jasa Giro Khusus</i>
979.3	<i>Penerimaan Bunga Bank</i>
979.31	<i>Bunga Deposito</i>
979.32	<i>Bunga Tabungan</i>
979.4	<i>Penerimaan Ganti Rugi Atas Kerugian Atau Kehilangan Kekayaan Daerah (TP-TGR)</i>
979.41	<i>Sumbangan Pihak ke Tiga</i>
979.42	<i>Sumbangan Pihak Ke Tiga Kendaraan (Daeler)</i>
979.43	<i>Sumbangan Pihak Ke Tiga Kayu</i>
979.5	<i>Penerimaan Lain-lain</i>
979.51	<i>Penerimaan Kembali Kredit Bank BKK</i>
979.52	<i>Ternak Tidak Layak Bibit</i>
979.53	<i>Sewa Internet</i>
979.54	<i>Penerimaan Dari Dana Bergulir / Revolving</i>
979.55	<i>Kerjasama Dengan BUMIDA</i>
979.56	<i>Penerimaan Duks</i>
979.57	<i>Tempat Rekreasi Nusakambangan</i>
979.58	<i>Seteron TP-TGR</i>
979.59	<i>Penerimaan Lainnya dari Setda / SKPD</i>
980	-
990	-

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**WAHJU WIDIASTUTI, S.H., L.L.M
NIP. 19690112 199903 2 005**

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
					unit kerja	
	305	P P N S	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
2	310	PERTAHANAN				
	311	Darat	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan Terganggu- n keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.	Bidang, Seksi, SuBag
	312	Laut	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggu- n keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat	Bidang Teknis

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	313	Udara	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggungan keamanan di lingkungan Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat	Bidang Teknis
	314	Perbatasan	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggungan keamanan di lingkungan Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat	Bidang Teknis
3	320	KEMILITERAN				
	321	Latihan Militer	terbatas	Eselon III	Mengakibatkan terganggungan keamanan di lingkungan Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat	Bidang Teknis
	322	Wajib Militer	terbuka	Eselon III	Mengakibatkan terganggungan keamanan di lingkungan Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat	Bidang Teknis

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	324	Kekayaan ABRI/ TNI	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggungan keamanan di lingkungan Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat	Bidang Teknis
	325	Pejabat Sipil dari ABRI/TNI Klasifikasi Dwifungsi ABRI/TNI	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggungan keamanan di lingkungan Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat	Bidang Teknis
4	330	KEAMANAN				
	331	Kepolisian	Terbatas	Eselon II	Mengakibatkan terganggungan keamanan di lingkungan Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat	Bidang Teknis
	332	Huru hara/ demonstrasi	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggungan keamanan di lingkungan Pemerintah	Bidang Teknis

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
					Kab. Kotawaringin Barat	
	333	Senjata api/ senjata tajam	terbatas	Eselon II	Mengakibatkan terganggungan keamanan di lingkungan Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat	Bidang Teknis
	334	Bahan Peledak	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggungan keamanan di lingkungan Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat	Bidang Teknis
	336	Surat surat Kaleng	Rahasia	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	337	Pengaduan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah	Bidang Teknis

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
					unit kerja	
	338	Himbauan / larangan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
5	340	PERTAHANAN SIPIL				
	341	Perlindungan Masyarakat (Linmas)	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
6	350	KEJAHATAN				
	351	Makar / Pemberontakan	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggungan keamanan di lingkungan Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat	Bidang Teknis
	352	Pembunuhan	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggungan keamanan di lingkunganPemerintah Kab. Kotawaringin Barat	Bidang Teknis